



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Katalog : 3102017.73

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

PROVINSI
Sulawesi Selatan

2019

<https://sulsel.bps.go.id>

The image features a light gray map of Sulawesi Selatan (South Sulawesi) as a background. The map shows the island's outline and internal regional boundaries. Overlaid on the map are several dark gray, semi-transparent, curved shapes that resemble stylized leaves or petals, creating a layered, artistic effect. The text is positioned on the right side of the map.

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

PROVINSI
Sulawesi Selatan

2019

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019

ISBN : 978-623-7581-67-3
Katalog BPS : 3102017.73
Nomor Publikasi : 73550.2037
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 64 halaman

Naskah :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar Kulit :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik – Provinsi Sulawesi Selatan

Ilustrasi :
www.freepik.com

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

*Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan,
dan/atau Menggandakan Sebagian atau Seluruh isi Buku ini Untuk
Tujuan Komersial Tanpa Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik.*

TIM PENYUSUN

**INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2019**

Pengarah

Yos Rusdiansyah

Penanggungjawab

Suri Handayani

Editor

Joko Siswanto

Penulis

Wuri Wahyuni

Desain Sampul dan Tata Letak

Muhammad Ilham Mubarok

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pembangunan manusia berbasis gender di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu dapat juga dilihat komponen capaian pembangunan manusia menurut jenis kelamin.

Kami mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak, untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Makassar, Desember 2020



Yos Rusdiansyah

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan



Daftar Isi

v	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
vii	DAFTAR TABEL
viii	DAFTAR GAMBAR
x	DAFTAR LAMPIRAN
1	BAB I
	PENDAHULUAN
3	1.1. Konsep Pembangunan Manusia
6	1.2. Konsep Pembangunan Gender
7	1.3. Pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG)
7	1.4. Variabel dalam Indeks Pembangunan Gender
19	BAB II
	GENDER DALAM RANAH MASYARAKAT
22	2.1. Kependudukan
24	2.2. Bidang Kesehatan
28	2.3. Bidang Pendidikan
32	2.4. Ketenagakerjaan
37	BAB III
	CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER SULAWESI SELATAN
39	3.1. Pembangunan Gender di Sulawesi Selatan
43	3.2. Posisi IPG Sulawesi Selatan di Indonesia
45	3.3. Pembangunan Gender di Kabupaten/Kota
47	BAB IV
	PEMBERDAYAAN GENDER SULAWESI SELATAN
49	4.1. Konsep Pemberdayaan Gender
50	4.2. IDG Sulawesi Selatan
55	4.3. Capaian Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota
59	LAMPIRAN

Daftar Tabel

- 7 : Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IPG
- 9 : Tabel 1.2 Konversi Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
- 9 : Tabel 1.3 Konversi Partisipasi Sekolah
- 12 : Tabel 1.4 Komoditas Penyumbang Penghitungan Paritas Daya Beli
- 23 : Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2019 (dalam Jiwa)
- 28 : Tabel 2.2 Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 (%)
- 29 : Tabel 2.3 Angka Partisipasi Kasar Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 (%)
- 29 : Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 (%)
- 35 : Tabel 2.5 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun 2019 (Periode Agustus)
- 45 : Tabel 3.1 Tabel UHH, RLS, dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019
- 50 : Tabel 4.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IDG
- 53 : Tabel 4.2 Jumlah PNS di Pemprov Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Kepangkatan Tahun 2019
- 53 : Tabel 4.3 Jumlah PNS di Pemprov Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2019

Daftar Gambar

- 3 Gambar 1.1 *Framework* Pembangunan
- 11 Gambar 1.2 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM
- 14 Gambar 1.3 Alur Perhitungan Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan
- 14 Gambar 1.4 Daftar Paket Komoditi Makanan dan NonMakanan yang dipergunakan dalam Perhitungan PPP untuk IPM Metode Baru
- 17 Gambar 1.5 Rumus Perhitungan IPM Metode Baru
- 18 Gambar 1.6 Gambaran Perhitungan IPM
- 21 Gambar 2.1 Peta Sulawesi Selatan
- 22 Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan, 2010-2019 (jiwa)
- 23 Gambar 2.3 Piramida Penduduk Sulawesi Selatan Tahun 2019
- 25 Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2019 (%)
- 25 Gambar 2.5 Persentase Penduduk Laki-laki yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kota dan Desa Tahun 2011-2019 (%)
- 26 Gambar 2.6 Persentase Penduduk Perempuan yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kota dan Desa Tahun 2011-2019 (%)
- 27 Gambar 2.7 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Sebulan Terakhir, Tahun 2019 (%)
- 30 Gambar 2.8 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
- 31 Gambar 2.9 Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
- 33 Gambar 2.10 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2019 (%)
- 33 Gambar 2.11 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2019 (%)
- 34 Gambar 2.12 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2019 (%)
- 34 Gambar 2.13 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 (%)
- 40 Gambar 3.1 Perkembangan IPG, IPM Laki-Laki, dan IPM Perempuan di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019
- 40 Gambar 3.2 Perkembangan UHH Laki-laki, UHH Perempuan dan Total UHH di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (Tahun)

Daftar Gambar

- 41 : **Gambar 3.3** Perkembangan HLS Laki-laki, HLS Perempuan dan Total HLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (Tahun)
- 42 : **Gambar 3.4** Perkembangan RLS Laki-laki, RLS Perempuan dan Total RLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (Tahun)
- 43 : **Gambar 3.5** Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Laki-laki dan Perempuan, dan Total Pengeluaran Perkapita Disesuaikan di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (Juta Rupiah)
- 44 : **Gambar 3.6** IPG Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019
- 46 : **Gambar 3.7** IPG Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
- 51 : **Gambar 4.1** Perkembangan IDG Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019
- 51 : **Gambar 4.2** Perkembangan Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019
- 52 : **Gambar 4.3** Perkembangan Indeks Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019
- 54 : **Gambar 4.4** Perkembangan Indeks Perempuan dalam Distribusi Pendapatan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019
- 55 : **Gambar 4.5** IDG Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019
- 55 : **Gambar 4.6** Indeks Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019
- 56 : **Gambar 4.7** Indeks Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019
- 57 : **Gambar 4.8** Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019

Daftar Lampiran

- 61 : Lampiran 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/
Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019
- 62 : Lampiran 2 Komponen IPG Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi
Selatan Tahun 2019
- 63 : Lampiran 3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/
Kota di Sulawesi Selatan dan Komponennya, 2019

<https://sulsel.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

<https://sulselipps.go.id>

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB I

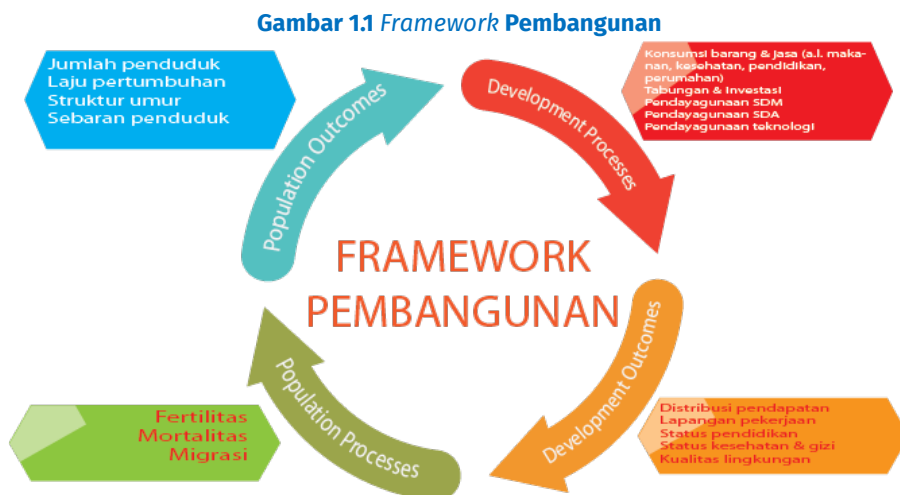
PENDAHULUAN

1.1. Konsep Pembangunan Manusia

Penduduk merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat menjadi pedang bermata dua, menjadi berkah jika pertumbuhan penduduk dibarengi dengan kualitas yang mumpuni, menjadi musibah jika pertumbuhan penduduk hanya sebatas kuantitas. Penduduk juga memegang peranan penting dalam pembangunan, integrasi penduduk dan pembangunan menjadi kajian penting.

Pada *International Conference on Population and Development* (ICPD) di Cairo pada 1994 yang dihadiri lebih dari 180 negara menghasilkan kesepakatan bahwa: integrasi antara penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan; pemberdayaan perempuan dan hak individu serta partisipasinya dalam pembangunan; setiap keluarga/pasangan berhak memiliki kehidupan kesehatan reproduksi yang baik, termasuk di dalamnya Keluarga Berencana; dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar, termasuk di dalamnya kesehatan ibu dan anak serta penanggulangan virus HIV/AIDS.

Proses pembangunan dan kependudukan merupakan suatu proses yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Kedua proses ini terjadi secara terus menerus membentuk suatu siklus pembangunan. Karena pada prinsipnya, pembangunan adalah suatu proses tanpa akhir, terus berkembang menuju kearah yang lebih baik. *Framework* pembangunan dan hubungan antara kependudukan dengan pembangunan ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Pada dekade sebelum Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja, sehingga pembangunan pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Peningkatan kemampuan dasar dapat dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal tersebut penting karena dapat direfleksikan dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

Paradigma pembangunan manusia yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dengan demikian bahwa penduduk merupakan tujuan akhir dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pembangunan manusia tersebut terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan :

1. **Produktivitas**, masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
2. **Pemerataan**, masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
3. **Kesinambungan**, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang akan tetapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi.
4. **Pemberdayaan**, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka (HDR, 1995).

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat

untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Hubungan antara pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi berlangsung melalui dua jalur. Jalur **pertama**; melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Besarnya pengeluaran tersebut merupakan indikasi tentang komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur **kedua**, melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga, dalam hal ini besarnya dan komposisi untuk nutrisi keluarga, biaya pelayanan kesehatan, dan pendidikan anggota rumah tangga. Jembatan yang menghubungkan antara pembangunan manusia dengan pembangunan ekonomi adalah melalui penciptaan kesempatan kerja.

Upaya pembangunan manusia dalam peningkatan kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja akan mempengaruhi penciptaan output yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Selain itu, faktor kelembagaan, distribusi sumber daya dan modal sosial merupakan hal yang tidak kalah penting.

Penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dilakukan oleh pemerintah ditempuh secara makro melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pengendalian inflasi, menekan tingkat pengangguran, dan memberikan kredit modal pada usaha kecil mikro dan menengah.

Hingga saat ini, masih relatif sedikit indikator statistik yang merupakan proksi untuk mengukur kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI), yang merupakan pendekatan untuk mengukur pencapaian pembangunan yang dititik beratkan pada kesejahteraan manusia. Sejak saat diperkenalkan oleh UNDP pada 1990, IPM menjadi pusat perhatian berbagai pihak, baik kalangan masyarakat umum, pemerintah, politikus maupun kalangan akademis. IPM menjadi populer karena cara perhitungannya yang sederhana, yaitu hanya merupakan rata-rata dari indikator kesehatan; pendidikan; dan pendapatan, tetapi nilai yang dihasilkan sangat berarti bagi pemerintah dalam menterjemahkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Jadi menurut indeks ini, pembangunan dikatakan berhasil jika memberikan dampak yang baik pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan tingkat daya beli masyarakat. Ukuran ini bersifat universal dan sangat humanis karena mencerminkan pencapaian harapan setiap orang dalam kehidupannya. Data yang diperoleh dari internet menunjukkan bahwa IPM lebih populer dibandingkan *Human Development Report* (HDR) dan *World Development Report* (WDR).

1.2. Konsep Pembangunan Gender

Gender merupakan serangkaian karakteristik yang terikat dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin serta berbagai hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender mulai diperkenalkan oleh ilmuwan sosial. Konsep perbedaan pada maksud gender tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan. Apabila terjadi ketidakadilan, dapat merugikan kerugian baik pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga, kesetaraan gender merupakan hak yang sewajarnya terjadi agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan yang nyata yang dinikmati oleh manusia dan melekat pada berbagai aspek, yaitu pemberdayaan, partisipasi, dan kerjasama, keamanan, keberlanjutan, dan kesetaraan, (Sen, 1989). Jika melihat komposisi jumlah penduduk, sumber daya manusia laki-laki dan perempuan hampir sama secara kuantitas. Jika terjadi kesetaraan gender dalam hal hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama, niscaya akan memperkuat kemampuan suatu wilayah untuk berkembang. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan SDGs yang ke-5, yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Kesetaraan ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan, dan variabel sosial ekonomi lainnya, selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Searah dengan target SDGs, meski tidak dicantumkan secara khusus, pemerintah dalam program Nawacita juga turut mencanangkan beberapa kebijakan gender yang tersirat dalam 3 agenda Nawacita, diantaranya:

1. Cita ke-2 yaitu “Membuat Pemerintah selalu Hadir dengan Membangun Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya”, kebijakan yang termaktub adalah meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan manusia.
2. Cita ke-4, yaitu “Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya”, kebijakannya adalah melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal.
3. Cita ke-5, yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Indonesia”, kebijakan terkait adalah peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi antardaerah dan kesenjangan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi salah satu alat dalam melihat keberhasilan pemerintah dalam implementasi program-program yang telah dicanangkan terkait gender dalam nawacita maupun SDGs.

1.3. Pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sejarah Pengukuran pembangunan gender di Indonesia dimulai sejak *United Nations Development Program* (UNDP) mengeluarkan laporan berkala yaitu *Human Development Report* (HDR) di tahun 1990 yang mencantumkan *Human Development Index* (HDI) atau IPM (BPS, 2015), lima tahun kemudian, UNDP memasukkan konsep HDI dengan kesetaraan gender (*Gender Equality*). Sejak tahun 1995 UNDP telah mengukur pembangunan berbasis gender. Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan gender dalam aspek pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang dihitung oleh BPS bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sejak tahun 2009. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM tetapi dipisahkan dalam porsi laki-laki dan perempuan. Adanya perubahan metodologi pengukuran GDI oleh UNDP di tahun 2010, menyebabkan penyesuaian pula di negara-negara yang melakukan penghitungan IPG. Pada tahun 2015, Indonesia merilis IPG metode baru dengan backcasting data hingga tahun 2010.

Tabel 1.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IPG

Dimensi	Indikator
Umur panjang dan sehat	Umur Harapan Hidup pada saat lahir (e_0), Laki-laki & Perempuan
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan 2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan

1.4 Variabel dalam Indeks Pembangunan Gender

Metodologi dan konsep penghitungan IPM dan IPG adalah sama, yang mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010. IPG merupakan penghitungan IPM yang dipisah secara laki-laki dan perempuan. Beberapa variabel yang telah disebutkan sebelumnya, dijabarkan secara umum sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup (UHH) Laki-Laki dan Perempuan

Umur harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy* (e_0) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil proyeksi SP2010. Dasar penghitungan UHH adalah menggunakan Angka Kematian Bayi laki-laki dan perempuan atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dengan pola model *West Coale-demeny Trussell equations* dan proyeksi IMR.

Untuk menghitung UHH, data yang digunakan adalah data kematian 0 tahun dan kelahiran level provinsi dari hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Sedangkan untuk level kabupaten/kota, harus tersedia data selisih Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Anak Masih Hidup (AMH) dari hasil SP210 untuk kabupaten/kota dan provinsi. Selanjutnya, kematian 0 tahun untuk kabupaten/kota diperoleh dengan rumus:

$$Kematian0th_{kab} = \frac{M_{kab}(SP2020)}{M_{prov}} \times Kematian0th_{prov} \text{ (Pr oyeksi)}$$

$$IMR_{kab} = \frac{Kematian0th_{kab}}{Kelahiran_{kab}}$$

Keterangan

$Kematian0th_{kab}$	= Kematian bayi 0 tahun Kabupaten/Kota
$M_{kab}(SP2020)$	= Selisih ALH dan AMH Kabupaten/Kota hasil SP2010
M_{prov}	= Selisih ALH dan AMH Provinsi
$Kematian0th_{prov} \text{ (Pr oyeksi)}$	= Kematian bayi 0 tahun Provinsi hasil proyeksi
IMR_{kab}	= Angka Kematian Bayi Kabupaten/Kota
$Kelahiran_{kab}$	= Jumlah Kelahiran Bayi di Kabupaten/Kota

Setelah diperoleh angka kematian 0 tahun untuk kabupaten/kota dengan menggunakan rumus diatas, selanjutnya dengan menggunakan program aplikasi Mortpack ditransformasi menjadi UHH. Atau secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IMR_{kab} \rightarrow e_{kab}^0$$

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki dan Perempuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan dalam menjalani pendidikan formal. Untuk nilai RLS, diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

RLS digunakan pada IPM metode lama dan metode baru untuk mengukur

dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun keatas. Sedangkan pada IPM metode baru, cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Untuk menghitung RLS, menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selanjutnya, pada keterangan pendidikan diperlukan skor/konversi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan seseorang yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Selain konversi pada ijazah terakhir yang dimiliki, untuk menghitung RLS perlu memperhatikan partisipasi sekolah untuk penduduk usai 25 tahun keatas. Walaupun diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun, penduduk baik laki-laki maupun perempuan telah menyelesaikan pendidikannya, tetapi masih ada kemungkinan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas dan masih sekolah. Sehingga

Tabel 1.2 Konversi Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)
Tidak Punya Ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

Tabel 1.3 Konversi Partisipasi Sekolah

Keterangan	Lama Sekolah
Masih bersekolah di SD s.d S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir-1 Konversi ijazah terakhir + 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Ket.: karena di SUSENAS, kode kelas untuk yang sedang kuliah S2=6 dan kuliah S3=7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

untuk partisipasi sekolah dapat dilihat pada tabel 1.3.

Setelah menghitung lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun keatas berdasarkan aturan konversi diatas, selanjutnya RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RLS_{25+} = \frac{1}{n_{25+}} \sum_{i=25}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan

RLS_{25+} = Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 25 tahun keatas

$\text{lama sekolah penduduk}_i$ = Total lama sekolah penduduk usia ke i disuatu wilayah

n_{25+} = Jumlah Penduduk Usia 25 tahun ke atas

c. Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-Laki Dan Perempuan

Angka harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam. Faktor koreksi untuk siswa yang sekolah di pesantren dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

$$\text{Jumlah santri sekolah dan mukim} = \text{rasio santri mukim} \times \text{Jumlah santri sekolah}$$

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}}$$

Sedangkan nilai HLS dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

- FK = Faktor Koreksi Pesantren
 E_i^t = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t
 P_i^t = Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t
 i = Penduduk usia ($a, a+1, \dots, n$)

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Laki-Laki Dan Perempuan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita ini dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli pada IPM metode baru ini menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.

Gambar 1.2 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM



Pada IPM metode lama, untuk menghitung paritas daya beli hanya menggunakan 27 komoditas. Dimana share 27 komoditas tersebut terus menurun dari 37,52 % pada tahun 1996 menjadi 24,66 % pada tahun 2012. Sedangkan pada IPM metode baru, penghitungan paritas daya beli dipilih 96 komoditas yang memberikan *share* sebesar 73,63 persen.

Selanjutnya, teknis penghitungan pendapatan perkapita yang disesuaikan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari Susenas. Langkah Pertama, menghitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga. Langkah Kedua, menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota. Langkah Ketiga, menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan.

$$Y_i' = \frac{(\text{rata-rata pengeluaran per kapita per bulan}) \times 12}{1000}$$

2. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil). Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

Tabel 1.4 Komoditas Penyumbang Penghitungan Paritas Daya Beli

Kelompok	Share Kelompok	Terpilih	
		Share	Jumlah Item
Makanan	47,29	39,82	66
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	3,95	2,30	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan Susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyak dan Lemak	1,79	1,75	3
Bahan Minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,40	3
Konsumsi Lainnya	1,00	0,61	1
Makanan dan Minuman Jadi	11,80	10,94	19
Tembakau dan Sirih	5,88	5,72	3
Non Makanan	52,71	33,81	30
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	20,58	15,74	10
Aneka Barang dan Jasa	18,79	13,50	12
Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala	3,76	3,35	4
Barang Tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, Pungutan, Asuransi	1,65	0,00	0
Keperluan, Pesta, Upacara/Kenduri	1,78	0,00	0
Total	100,00	73,63	96

$$Y_t^* = \frac{Y_t'}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Keterangan

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y_t' = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

- Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP). Langkah Pertama, menghitung harga rata-rata komoditas terpilih. Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK. Rata-rata harga komoditas terpilih dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan

P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah

V_i = Total *value* (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah

Q_i = Total Kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Langkah Kedua, menghitung paritas daya beli dengan menggunakan Metode Rao. Atau secara matematik dirumuskan sebagai:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan

PPP_j = Paritas Daya Beli (PPP) Kabupaten/Kota ke- j

p_{ij} = Harga komoditas i di Kabupaten/Kota j

p_{ik} = Harga komoditas i di Kabupaten/Kota k

m = Jumlah komoditas

4. Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Keterangan

Y_t^{**} = Rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

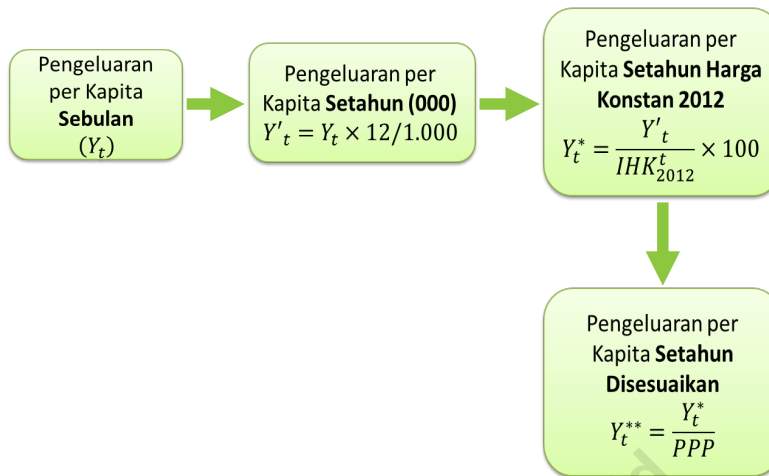
Indeks komposit pembentuk IPM meliputi:

a. Indeks Kesehatan Laki-Laki Dan Perempuan

Indeks Kesehatan dalam IPM dihitung dari Umur Harapan Hidup (UHH) laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, indeks kesehatan menyatakan seberapa persen capaian indikator kesehatan terhadap nilai maksimumnya. Nilai maksimum yang digunakan dalam indeks kesehatan adalah 85 tahun, mengacu pada nilai maksimum yang direkomendasikan oleh UNDP. Angka ini merupakan UHH tertinggi Negara Jepang.

Sedangkan nilai minimum UHH adalah 20 tahun seperti yang direkomendasikan

Gambar 1.3 Alur Perhitungan Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan



Gambar 1.4 Daftar Paket Komoditi Makanan dan NonMakanan yang dipergunakan dalam Perhitungan PPP untuk IPM Metode Baru

Makanan	Beras	Pepaya	Nonmakanan
	Tepung terigu	Minyak kelapa	
	Ketela pohon/singkong	Minyak goreng lainnya	
	Kentang	Kelapa	
	Tongkol/tuna/cakalang	Gula pasir	
	Kembung	Teh	
	Bandeng	Kopi	
	Mujair	Garam	
	Mas	Kecap	
	Lele	Penyedap masakan/vetsin	
	Ikan segar lainnya	Mie instan	
	Daging sapi	Roti manis/roti lainnya	
	Daging ayam ras	Kue kering	
	Daging ayam kampung	Kue basah	
	Telur ayam ras	Makanan gorengan	
	Susu kental manis	Gado-gado/ketoprak	
	Susu bubuk	Nasi campur/rames	
	Susu bubuk bayi	Nasi goreng	
	Bayam	Nasi putih	
	Kangkung	Lontong/ketupat sayur	
	Kacang panjang	Soto/gule/sop/rawon/cincang	
	Bawang merah	Sate/tongseng	
	Bawang putih	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	
	Cabe merah	Makanan ringan anak	
	Cabe rawit	Ikang (goreng/bakar dll)	
	Tahu	Ayam/daging (goreng dll)	
	Tempe	Makanan jadi lainnya	
	Jeruk	Air kemasan galon	
Mangga	Minuman jadi lainnya		
Salak	Es lainnya		
Pisang ambon	Roko kretek filter		
Pisang raja	Rokok kretek tanpa filter		
Pisang lainnya	Rokok putih		
		Rumah sendiri/bebas sewa	
		Rumah kontrak	
		Rumah sewa	
		Rumah dinas	
		Listrik	
		Air PAM	
		LPG	
		Minyak tanah	
		Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)	
		Perlengkapan mandi	
		Barang kecantikan	
		Perawatan kulit,muka,kuku,rambut	
		Sabun cuci	
		Biaya RS Pemerintah	
		Biaya RS Swasta	
		Puskesmas/pustu	
		Praktek dokter/poliklinik	
		SPP	
		Bensin	
		Transportasi/pengangkutan umum	
		Pos dan Telekomunikasi	
		Pakaian jadi laki-laki dewasa	
		Pakaian jadi perempuan dewasa	
		Pakaian jadi anak-anak	
		Alas kaki	
		Minyak Pelumas	
		Meubelair	
		Peralatan Rumah Tangga	
		Perlengkapan perabot rumah tangga	
		Alat-alat Dapur/Makan	

UNDP. Angka minimum 20 tahun ini juga merupakan UHH terendah. Berpedoman pada nilai minimum dan maksimum ini, indeks kesehatan dirumuskan sebagai:

$$I_{kesehatan} = \left(\frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{mak} - UHH_{min}} \right) \times 100$$

Keterangan

- $I_{kesehatan}$ = Indeks Kesehatan
- UHH = Umur Harapan Hidup
- UHH_{mak} = Nilai Maksimal untuk Umur Harapan Hidup
- UHH_{min} = Nilai Minimum untuk Umur Harapan Hidup

Dengan memasukkan angka minimum dan maksimum untuk UHH, maka rumus diatas dapat ditulis kembali menjadi:

$$I_{kesehatan} = \left(\frac{UHH - 20}{85 - 20} \right) \times 100 = \left(\frac{UHH - 20}{65} \right) \times 100$$

b. Indeks Pendidikan Laki-Laki Dan Perempuan

Dalam IPM metode baru, indeks pendidikan laki-laki dan perempuan diukur oleh dua indikator, yaitu RLS dan HLS baik laki-laki maupun perempuan. Harapan lama sekolah (HLS) merupakan pendorong (*booster*) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS). Sehingga intervensi pemerintah sebaiknya diarahkan pada peningkatan partisipasi sekolah yang dampaknya akan meningkatkan HLS dan pada akhirnya akan meningkatkan RLS.

Indeks rata-rata lama sekolah, merupakan persentase capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas yang terbagi dalam laki-laki dan perempuan, dibandingkan nilai maksimumnya. Nilai maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun, sesuai dengan yang digunakan oleh UNDP. Indeks rata-rata lama sekolah dirumuskan sebagai:

$$I_{RLS} = \left(\frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{mak} - RLS_{min}} \right) \times 100$$

Keterangan

- I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah
- RLS = Rata-rata lama sekolah
- RLS_{mak} = Nilai Maksimal untuk rata-rata lama sekolah
- RLS_{min} = Nilai Minimum untuk rata-rata lama sekolah

dengan memasukkan nilai maksimum dan minimum yang direkomendasikan oleh UNDP, maka rumus diatas menjadi

$$I_{RLS} = \left(\frac{RLS - 0}{15 - 0} \right) \times 100 = \left(\frac{RLS}{15} \right) \times 100$$

Selanjutnya, untuk indeks harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan merupakan persentase capaian harapan lama sekolah terhadap nilai maksimum (18 tahun). Angka 18 tahun mengacu pada nilai maksimum yang digunakan oleh UNDP. Jika kita telusuri secara seksama, nilai maksimum ini merupakan penjumlahan lama sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Indeks HLS dirumuskan sebagai berikut

$$I_{HLS} = \left(\frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \right) \times 100$$

Keterangan

- I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah
- HLS = Harapan lama sekolah
- HLS_{\max} = Nilai Maksimal untuk harapan lama sekolah
- HLS_{\min} = Nilai Minimum untuk harapan lama sekolah

dengan memasukkan nilai maksimum dan minimum yang direkomendasikan oleh UNDP, maka rumus diatas menjadi

$$I_{HLS} = \left(\frac{HLS - 0}{18 - 0} \right) \times 100 = \left(\frac{HLS}{18} \right) \times 100$$

Selanjutnya dari indeks RLS dan indeks HLS tersebut diintegrasikan menjadi indeks pendidikan. Pada awalnya, tahun 2010 indeks pendidikan menggunakan rata-rata geometrik. Tetapi untuk penyempurnaan, pada tahun 2014 dirubah metodenya menggunakan rata-rata aritmatik, yang dirumuskan sebagai berikut

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

Keterangan

- $I_{Pendidikan}$ = Indeks Pendidikan
- I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah
- I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

c. Indeks Pengeluaran Laki-Laki Dan Perempuan

Dibandingkan indeks yang lainnya, batas minimum dan maksimum untuk indeks pengeluaran tidak mengikuti rekomendasi UNDP. Batas maksimum dan minimum indeks pendapatan menggunakan satuan rupiah, bukan dollar seperti

yang digunakan oleh UNDP. Selain itu, acuan nilai minimum dan maksimumnya juga menggunakan batas nilai minimum dan maksimum kabupaten/kota di Indonesia. Batas nilai minimum adalah merupakan garis kemiskinan Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pada tahun 2010. Sedangkan batas maksimum pengeluaran per kapita disesuaikan adalah nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Indeks pengeluaran dirumuskan sebagai berikut:

$$I_{\text{pendapatan}} = \left(\frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}{\ln(\text{pendapatan}_{\max}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})} \right) \times 100$$

Keterangan

- $I_{\text{pendapatan}}$ = Indeks Pendapatan
 Pendapatan = Pendapatan suatu daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
 Pendapatan_{min} = Batas minimum untuk pendapatan
 Pendapatan_{max} = Batas maksimum untuk pendapatan

Selanjutnya, dengan memasukkan batas minimum ($\ln(1.007,436)$) dan maksimum ($\ln(26.572,352)$) pada rumus diatas, diperoleh rumus sebagai berikut

$$I_{\text{pendapatan}} = \left(\frac{\ln(\text{pendapatan}) - 6,92}{10,19 - 6,92} \right) \times 100$$

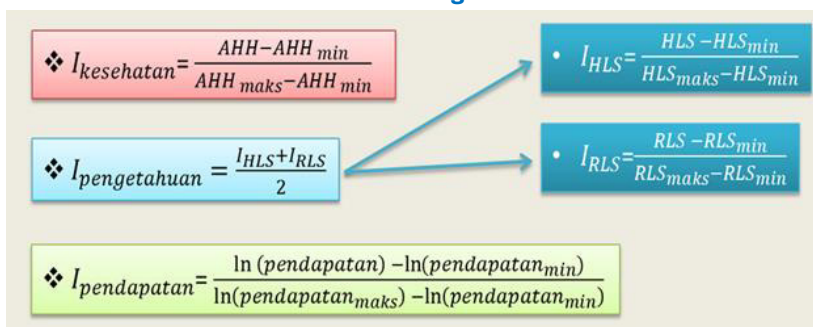
Penghitungan IPM Metode Baru

Berdasarkan berbagai uraian dan rumus yang telah dijabarkan diatas, maka IPM metode baru dirumuskan sebagai

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

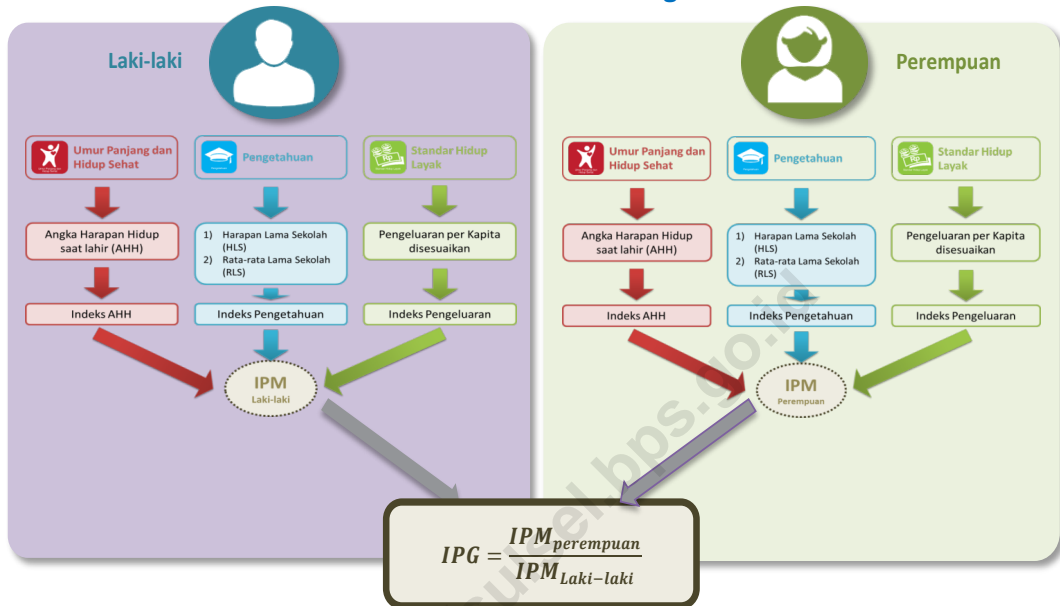
Secara ringkas, proses penghitungan indeks untuk IPM metode baru dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 1.5 Rumus Perhitungan IPM Metode Baru



Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam pengukuran IPG, semua variabel pembentuk IPM yang telah disebutkan di hitung dalam laki-laki dan perempuan. Pengukuran IPM yang dipilah antara laki-laki dan perempuan, menghasilkan rasio yang disebut IPG.

Gambar 1.6 Gambaran Perhitungan IPM





BAB II

GENDER DALAM RANAH MASYARAKAT

<https://smpkps.go.id>

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB II

GENDER DALAM RANAH MASYARAKAT

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah dengan luas 46.717,48 km² dengan persentase terhadap keseluruhan luas wilayah Indonesia adalah sebesar 2,44 persen. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menaungi 24 daerah tingkat II dengan 21 wilayah berstatus kabupaten dan 3 wilayah kota (Makassar, Palopo, dan Parepare). Kabupaten terakhir yang terbentuk adalah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Toraja.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang relatif lebih maju dibanding dengan provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia sehingga terkenal dengan sebutan Pintu Gerbang Indonesia Timur. Sejak tahun 1960, pemerintah telah memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dalam periode 1960 hingga sekarang sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian, predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial namun tidak dipungkir

Gambar 2.1 Peta Sulawesi Selatan



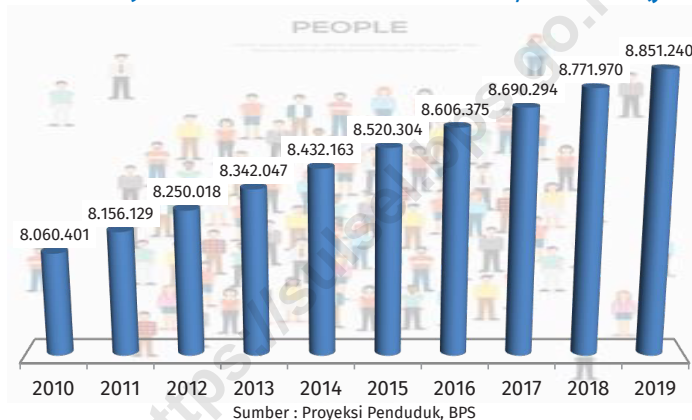
kecenderungan besarnya sumbangan sektor pertanian semakin menurun setiap tahunnya. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa.

2.1. Kependudukan

Penduduk dikonotasikan sebagai orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, kampung, wilayah atau negeri, dan merupakan aset pembangunan atau sering disebut sumber daya manusia.

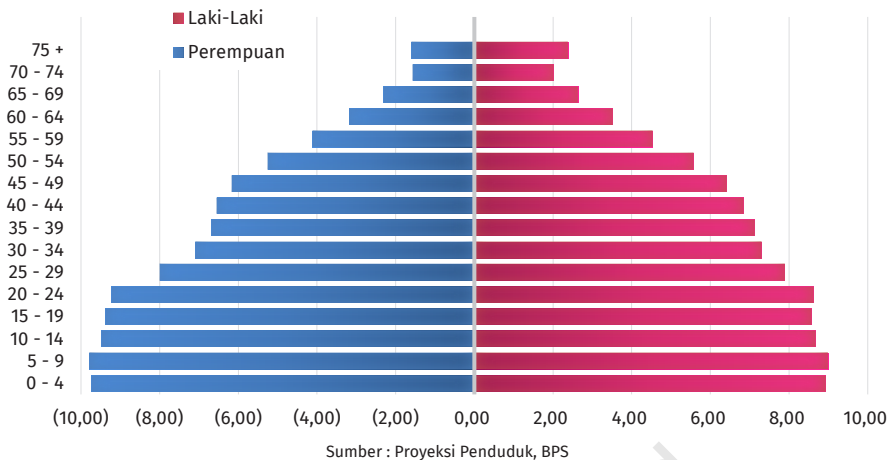
Jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi Sesus Penduduk 2010 sebanyak 8,85 juta jiwa.

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan, 2010-2019 (jiwa)



Terjadinya pertumbuhan penduduk diantaranya adalah karena adanya kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang relatif besar terjadi di daerah perkotaan beserta kabupaten disekitarnya. Hal ini adalah wajar, karena kegiatan ekonomi masyarakat berpusat di daerah perkotaan. Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, kabupaten/kota yang memiliki penambahan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Makassar yaitu bertambah sekitar 184 ribu jiwa. Selain Kota Makassar, pertumbuhan penduduk yang juga relatif besar terjadi di Kabupaten Gowa (sebesar 118 ribu jiwa), yang merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Sementara Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang paling lambat dibandingkan kabupaten/kota lain.

Dari komposisi penduduk, dengan *sex ratio* sebesar 95,61 menunjukkan bahwa di tahun 2019, jumlah penduduk perempuan masih lebih besar dibanding dengan penduduk laki-laki. Komposisi ini hampir terjadi pada semua kelompok umur, kecuali kelompok usia 0 hingga 24 tahun, dimana pada kelompok ini, laki-laki masih mendominasi jumlah penduduk.

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Sulawesi Selatan Tahun 2019

Dominasi jumlah penduduk perempuan terhadap laki-laki juga hampir merata di wilayah Sulawesi Selatan. Data proyeksi penduduk menyebutkan, hanya 5 kabupaten/kota yang memiliki sex ratio di atas 100, yaitu Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Toraja Utara. Yang tertinggi adalah Luwu Timur dengan sex ratio sebesar 105,72.

Besarnya komposisi jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki perlu dilihat sebagai potensi, mengingat peran penting perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Yang tak bisa dikesampingkan adalah peran perempuan sebagai pencetak generasi-generasi penerus. Untuk konteks ini, perlu perhatian serius khususnya terhadap kesehatan perempuan sebagai calon ibu.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 (dalam Jiwa)

Kab/ Kota	Laki-laki	Perempuan	Kab/ Kota	Laki-laki	Perempuan
01. Selayar	65.424	70.200	13. Wajo	190.693	207.121
02. Bulukumba	198.701	221.902	14. Sidrap	148.201	153.771
03. Bantaeng	90.380	97.246	15. Pinrang	183.129	193.990
04. Jeneponto	175.607	188.185	16. Enrekang	103.627	102.760
05. Takalar	143.674	155.014	17. Luwu	177.382	184.645
06. Gowa	380.488	392.196	18. Tator	118.102	115.900
07. Sinjai	118.202	125.923	19. Luwu Utara	156.878	156.005
08. Maros	172.793	180.328	20. Luwu Timur	154.006	145.667
09. Pangkep	162.618	172.896	21. Toraja Utara	115.712	115.502
10. Barru	83.878	90.445	22. Makassar	755.968	770.709
11. Bone	363.030	395.559	23. Pare-Pare	71.406	73.772
12. Soppeng	106.927	120.064	24. Palopo	89.583	95.031

Tak kalah penting peran perempuan adalah dalam sisi produktivitas, yaitu sebagai penyumbang angkatan kerja. Dari komposisi penduduk, usia produktif penduduk, yaitu pada kelompok usia 15-64 tahun, di dominasi oleh kaum perempuan. Komposisi penduduk perempuan yang besar merupakan aset dan potensi wilayah, namun sebaliknya, jika perempuan tidak mampu berkarya secara produktif, baik untuk pribadi, keluarga maupun ranah masyarakat, maka justru akan menjadi beban bagi wilayah.

2.2. Bidang Kesehatan

Menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia tahun 1992, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hidup sehat merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap insan mempunyai hak untuk menikmati derajat kesehatan yang tinggi bagi kehidupannya. Agar dapat dicapai derajat kesehatan yang tinggi, penduduk juga harus mendapatkan hak-haknya atas kecukupan dalam memperoleh pangan (makanan dan air minum), sandang berupa pakaian, papan dalam bentuk perumahan/pemukiman yang layak dan siap huni, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan selain angka kesakitan, dan angka kematian bayi yang dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan kesehatan.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Disamping itu, setiap individu juga bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Kemajuan dalam pembangunan kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan nasional dan sebaliknya pembangunan nasional akan mempunyai dampak penting terhadap derajat kesehatan penduduk.

Pada hakekatnya derajat kesehatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan peran serta masyarakat dan swasta.

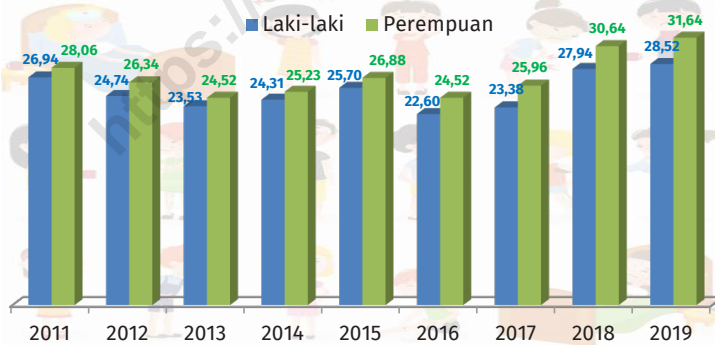
Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan dapat dilihat dari derajat kesehatan dan gizi penduduk, meningkatnya pelayanan kesehatan, dan bertambah baiknya lingkungan kesehatan masyarakat.

a) Kualitas Kesehatan Masyarakat

Faktor biologis dan gaya hidup mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Daya tahan perempuan lebih baik dibanding laki-laki. Dari sejak masa di dalam kandungan hingga lahir, laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan. Dari segi kromosom, sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X yang mengandung sekitar 1100 gen, selain berperan penting dalam pengaturan hormone, kromosom X juga berperan dalam fungsi vital tubuh lainnya, sementara pada laki-laki yang memiliki kromosom Y hanya mengandung sekitar 100 gen.

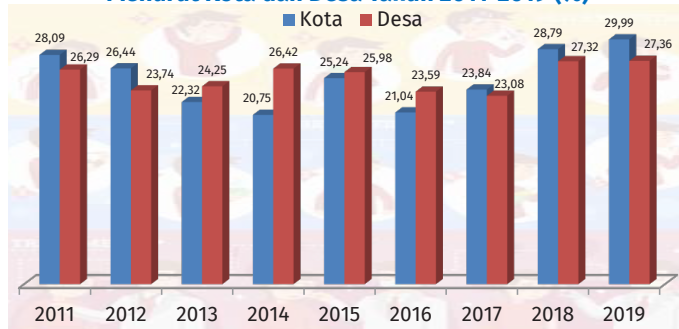
Dilihat dari gaya hidup, kebiasaan hidup sehat seperti tidak merokok lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Disamping rokok, secara umum banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas diluar dibandingkan dengan perempuan. Padatnya aktivitas diluar ruangan juga mendatangkan berbagai macam resiko kesehatan dan keselamatan. Meski perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dari laki-laki, namun secara umum perempuan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Kondisi ini terlihat dari data keluhan kesehatan. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2019, persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan lebih banyak dibanding laki-laki.

Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2019 (%)



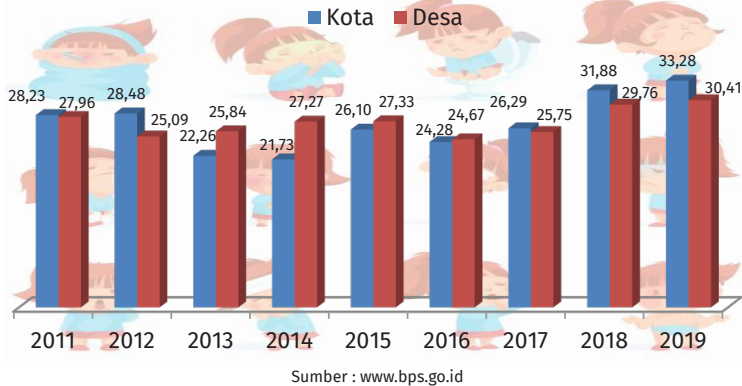
Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.5 Persentase Penduduk Laki-laki yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kota dan Desa Tahun 2011-2019 (%)



Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.6 Persentase Penduduk Perempuan yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kota dan Desa Tahun 2011-2019 (%)



Dari segi kewilayahan, semakin maju suatu wilayah, seharusnya berafiliasi pula dengan tingkat kesehatan masyarakatnya. Meski data persentase keluhan kesehatan penduduk tidaklah sama setiap tahunnya, namun kenyataannya, dalam tiga tahun terakhir (2017 hingga 2019) data Susenas mencatat wilayah perkotaan justru lebih banyak mempunyai keluhan kesehatan dibanding penduduk desa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perbedaan gaya hidup dan pola pikir masyarakat kota dan desa cukup mempengaruhi alasan lebih banyaknya keluhan kesehatan di perkotaan dibanding desa.

Rentannya perempuan terhadap sakit juga diperkuat dengan data jumlah penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir. Dari 14,30 persen total penduduk yang menderita sakit, persentase penduduk perempuan yang menderita sakit sekitar 51 persen, lebih banyak dibanding persentase penduduk laki-laki yang menderita sakit selama sebulan terakhir, yaitu sekitar 49 persen. Meski demikian, persentase penduduk perempuan yang menderita sakit sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 mencapai 53 persen.

b) Akses Kesehatan Masyarakat

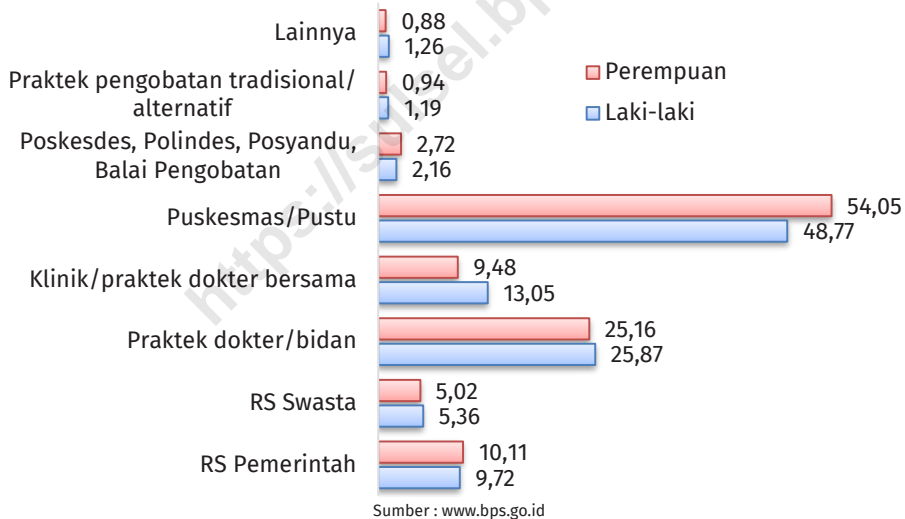
Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi suatu keharusan.

Selain jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, derajat kesehatan penduduk tercermin dari persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau. Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat

dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan. Dari beberapa alternatif fasilitas kesehatan, ternyata puskesmas/pustu lebih diminati oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ketersediaan, kemudahan akses serta biaya menjadi pendorong tingginya minat masyarakat untuk berobat di puskesmas/pustu. Dari segi gender, sekitar 54 persen perempuan pergi berobat di puskesmas/pustu selama sebulan terakhir, sementara laki-laki hampir 49 persen. Jenis fasilitas kesehatan yang dipilih laki-laki cenderung lebih modern, tampak dari Gambar 2.7, laki-laki cenderung lebih berminat untuk berobat di rumah sakit swasta, praktek dokter, dan klinik/praktek dokter bersama dibanding perempuan.

Gambar 2.7 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Sebulan Terakhir, Tahun 2019 (%)



Ketiadaan biaya pengobatan menjadi salah satu alasan penduduk untuk tidak berobat jalan (sekitar 1,09 persen). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia tak terkecuali penduduk Sulawesi Selatan, tujuannya mengatasi kendala biaya pengobatan. Sampai saat ini, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat. Fungsi keberadaannya terus meningkat, tampak dari data kepemilikan JKN, penduduk yang tidak menggunakan JKN terus mengalami penurunan, dari 37,27 persen di tahun 2018 menjadi 36,89 persen di tahun 2019. Secara gender, penduduk perempuan lebih banyak yang memiliki JKN dibanding

penduduk laki-laki. Dari 4,52 juta penduduk perempuan, sekitar 65 persen telah memiliki jaminan kesehatan, sementara pada penduduk laki-laki sekitar 61 persen.

2.3. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar penduduk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan. Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan yang tinggi merupakan unsur penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi diharapkan akan berimplikasi kepada produktivitas yang tinggi pula sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Semakin bagus kualitas pendidikan, maka semakin berkurang kesenjangan gender. Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan pendidikan melalui berbagai program, antara lain dengan meningkatkan pengadaan sarana/prasarana pendidikan, program wajib belajar, beasiswa dan pemberian bantuan operasional sekolah serta beberapa program lainnya. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas.

a) Angka Partisipasi

Ada beberapa ukuran untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.

Secara umum tahun 2019, APS SD sebesar 99,20 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Sulawesi Selatan sedang mengikuti pendidikan

Tabel 2.2 Angka Partisipasi Sekolah Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 (%)

Jenis Kelamin	5-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
Laki-laki	22,09	98,87	92,62	68,75
Perempuan	23,94	99,61	93,85	72,99
Total	22,94	99,23	93,22	70,85

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan 2019

Sekolah Dasar. Secara gender, partisipasi perempuan usia SD lebih banyak dibanding laki-laki, begitu pula pada usia setingkat SLTP dan SLTA, perempuan lebih unggul. Dengan melihat data APS yang dimulai dari partisipasi sekolah usia 5 tahun, dapat kita baca bahwa secara data, kesadaran akan menuntut ilmu pada jenjang sekolah belum sesuai dengan proporsi jumlah penduduk pada usia sekolah. Usia 5 hingga 18 tahun sex ratio berada di atas 100, yang berarti pada usia tersebut didominasi oleh penduduk laki-laki, sedangkan APS didominasi oleh perempuan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah.

Untuk melihat sejauh mana anak usia sekolah yang terserap diberbagai pendidikan dasar hingga pendidikan lanjutan atas, salah satunya menggunakan indikator Angka Partisipasi Kasar. Untuk jenjang sekolah dasar, pada tahun 2019, anak yang bersekolah di jenjang pendidikan dasar menjadi 108,46 persen. Artinya jumlah murid yang bersekolah di tingkat SD jauh lebih banyak dari penduduk usia 7-12 tahun, ada sekitar 8,46 persen usianya diluar rentang usia tersebut. Fenomena ini boleh jadi disebabkan oleh beberapa hal, misalnya adanya siswa yang belum cukup umur masuk di kelas satu SD, atau siswa yang telat mendaftar sekolah, atau terjadinya pengulangan kelas pada siswa.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, kenaikan terjadi untuk APK jenjang SLTA dari 81,74 persen menjadi 86,09 persen, sementara untuk jenjang SD dan SLTP, mengalami penurunan.

Tabel 2.3 Angka Partisipasi Kasar Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 (%)

Jenis Kelamin	APK SD	APK SLTP	APK SLTA
Laki-laki	108,21	84,93	82,39
Perempuan	108,71	83,49	89,85
Total	108,46	84,22	86,09

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2019

Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 (%)

Jenis Kelamin	APM SD	APM SLTP	APM SLTA
Laki-laki	97,43	75,53	58,37
Perempuan	98,72	76,13	61,94
Total	98,06	75,82	60,14

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan 2019

Secara gender, di tahun 2019, pada semua jenjang sekolah, APK perempuan lebih mendominasi dibanding APK laki-laki.

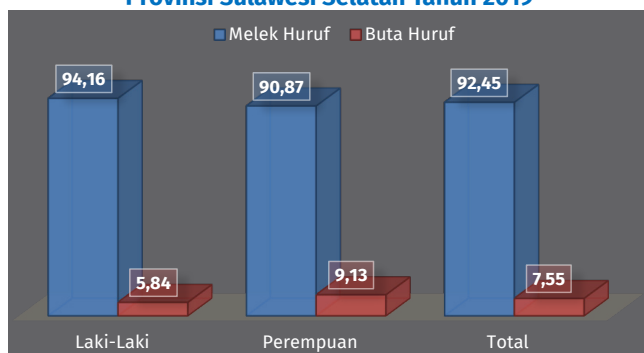
Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Manfaat dari angka ini adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Secara total, di tahun 2019, APM Sulawesi Selatan pada seluruh jenjang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk jenjang SD APM naik dari 98,03 di tahun 2018 menjadi 98,06 di tahun 2019. APM jenjang SMP bergerak dari 75,13 persen menjadi 75,82 persen, sementara untuk jenjang SMA, APM naik dari 60,03 persen di tahun 2018 menjadi 60,14 persen di tahun 2019.

Secara gender, APM perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, pada seluruh jenjang pendidikan. Melihat jumlah penduduk perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki pada usia tersebut, artinya terjadi kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Meski demikian, fenomena ini juga bisa menandakan, bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak lagi menjadi penghalang untuk melaksanakan pendidikan. Kesempatan sekolah sudah merata bagi siapapun di wilayah Sulawesi Selatan.

b) Melek Huruf

Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan suatu penduduk dalam kemampuan dasarnya terhadap pengetahuan adalah Angka Melek Huruf (AMH). Semakin tinggi AMH suatu wilayah, semakin terbuka akses pengetahuan penduduk wilayah tersebut. Tahun 2019, lebih dari 90 persen penduduk Sulsel yang berusia 15 tahun keatas telah memiliki kemampuan baca dan tulis. Selain program wajib belajar 12 tahun, berbagai usaha lain seperti kejar program paket A, paket B dan program keaksaraan Nasional nyata mendongkrak kemampuan baca tulis penduduk.

Gambar 2.8 Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2019

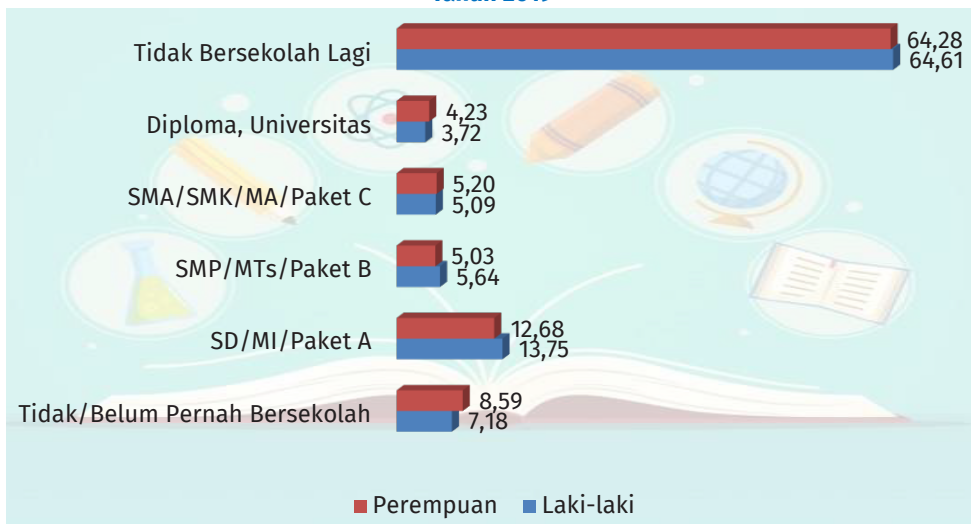
Membaca data tidak hanya secara umum, perlu pula melihat pola persebarannya juga, agar perbaikan dapat dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Sulsel. Dari 24 kabupaten/kota, Parepare menjadi kota dengan angka melek huruf tertinggi, sementara Jeneponto menjadi kabupaten dengan angka melek huruf terendah. Masih ada 13 kabupaten yang memiliki angka melek huruf di bawah rata-rata Sulsel.

Jika melihat secara gender, kemampuan baca tulis laki-laki masih lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ini telah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Ketidaksetaraan ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, dari Gambar 2.8 dapat pula dimaknai bahwa pemerintah masih punya tanggungan untuk mengatasi hampir 8 persen penduduk Sulsel yang buta huruf serta mengurangi diskrepansi buta huruf laki-laki dan perempuan. Kondisi buta huruf ini berhubungan dengan banyaknya penduduk yang tidak ataupun belum pernah sekolah.

Data tahun 2019 menunjukkan secara total, dari hampir 8 persen penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah, terdapat perbedaan yang cukup berjarak secara gender. Jumlah penduduk perempuan yang tidak atau belum pernah bersekolah sekitar 9 persen, sementara laki-laki sekitar 6 persen. Penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah, tentu secara kemampuan pengetahuan dan pendidikan tidaklah memadai. Bahkan akan mempengaruhi jumlah penduduk yang buta huruf.

Gambar 2.9 Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Selatan 2019

Optimalisasi program-program yang telah dicanangkan serta mencari terobosan-terobosan baru perlu dilakukan guna pemeberantasan buta huruf, peningkatan angka melek huruf, serta kualitas pendidikan, juga mencapai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke empat yaitu perwujudan pendidikan berkualitas.

2.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Akhir-akhir ini topik mengenai masalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional mendapat perhatian banyak orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan penambahan investasi dan kebijakan ekonomi yang kondusif merupakan suatu hal penting. Dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Sumber data yang dipergunakan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Sebenarnya data angkatan kerja juga dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), namun karena data Sakernas lebih spesifik sehingga dalam bahasan ini akan digunakan data Sakernas.

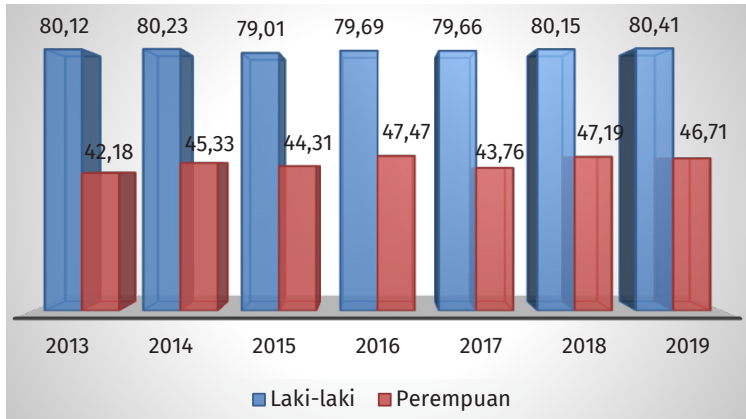
Indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan tenaga kerja serta elastisitasnya.

a) Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka ini perlu dicermati, karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Dalam ranah gender, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Secara total, pada periode Agustus 2019, persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja berada di pusaran 63 persen. Secara gender, TPAK mencatat hanya sekitar 47 persen perempuan yang siap dalam dunia kerja. Sementara laki-laki sudah mencapai sekitar 80 persen. Ternyata dunia kerja masih di dominasi laki-laki.

Gambar 2.10 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2019

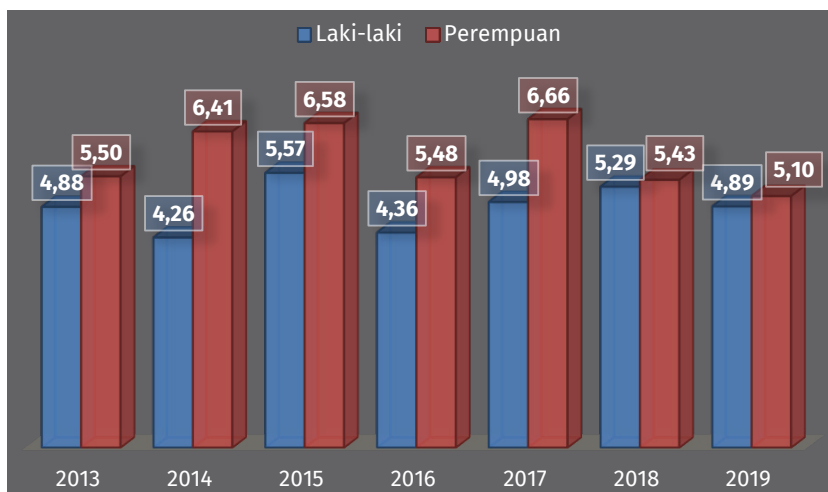


Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus 2019

b) Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi semua penduduk yang masuk dalam angkatan kerja namun tidak punya pekerjaan, mempersiapkan usaha, ataupun mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Berkebalikan dengan partisipasi angkatan kerja, TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup jauh perbedaannya, dimana laki-laki jauh lebih banyak dibanding perempuan, persentase pengangguran justru lebih dominan perempuan. Fenomena ini menunjukkan kesempatan dan peluang kerja bagi perempuan masih belum terbuka lebar.

Gambar 2.11 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2019

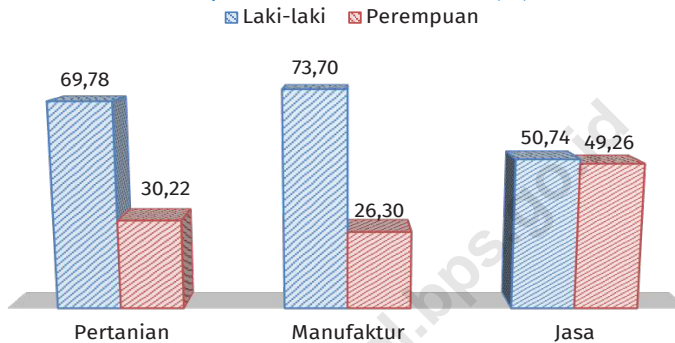


Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus 2019

c) Kondisi Pekerjaan

Mereka yang terserap di tiga lapangan pekerjaan utama (pertanian, manufaktur, dan jasa) pada periode Agustus, secara total masih dominan pada sektor pertanian (sekitar 36 persen), meski demikian penyerapan pada sektor ini semakin menurun setiap tahunnya. Pekerja pada sektor ini pun lebih di dominasi oleh laki-laki. Dari 100 orang pekerja di sektor pertanian, sekitar 70 orang adalah laki-laki, sementara perempuan sebanyak 30 orang.

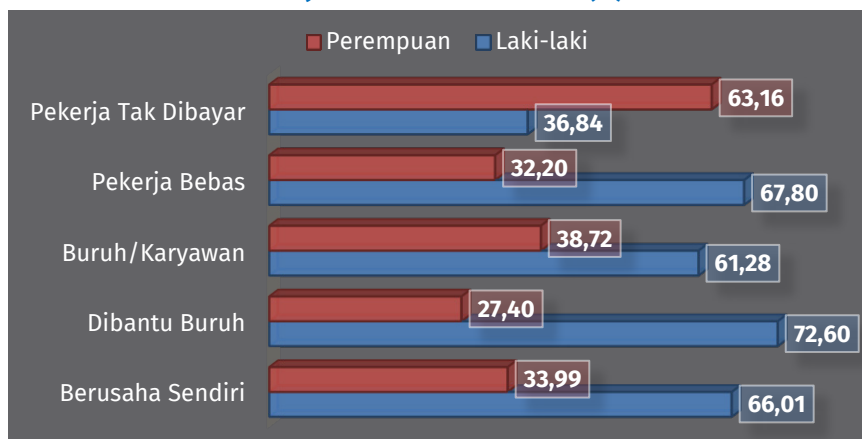
Gambar 2.12 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2019 (%)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus 2019

Jika melihat status pekerjaan, ternyata perempuan lebih dominan pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar. Persentasenya cukup menonjol, dari sekitar 100 orang pekerja tak dibayar, 63 orang adalah perempuan. Sementara status pekerjaan lain yang bisa dikatakan menghasilkan pemasukan (status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh, karyawan, dan pekerja bebas), persentase laki-laki masih jauh mendominasi.

Gambar 2.13 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 (%)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus 2019

Dari jenis pekerjaan yang dilakukan, jenis tenaga profesional, tenaga tata usaha dan yang sejenis, tenaga tata usaha jasa penjualan, dan tenaga usaha jasa, merupakan empat jenis pekerjaan yang didominasi perempuan. Sementara tenaga kepemimpinan, tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, serta tenaga produksi, operator alat dan pekerja kasar, didominasi laki-laki.

Durasi kerja antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Secara umum, jumlah jam kerja penduduk lebih dari 35 jam seminggu. Jika dilihat secara gender, persentase laki-laki yang bekerja di atas 35 jam seminggu lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 2.5 Persentase Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun 2019

Penduduk Bekerja	Laki-Laki	Perempuan
Jenis Pekerjaan		
Tenaga Profesional	39,38	60,62
Tenaga Kepemimpinan	78,49	21,51
Tenaga Tata Usaha dan Yang Sejenis	49,24	50,76
Tenaga Tata Usaha Jasa Penjualan	40,40	59,60
Tenaga Usaha Jasa	40,32	59,68
Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	69,70	30,30
Tenaga Produksi, Operator, Alat-alat, dan Pekerja Kasar	76,92	23,08
Jam Kerja Seminggu		
0 Jam	66,96	33,04
1 – 14 Jam	45,68	54,32
15 – 34 Jam	57,46	42,54
Lebih dari 35 Jam	65,77	34,23

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Agustus 2019



BAB III

CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER SULAWESI SELATAN

<http://www.kemendagri.go.id>

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB III

CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER SULAWESI SELATAN

3.1. Pembangunan Gender di Sulawesi Selatan

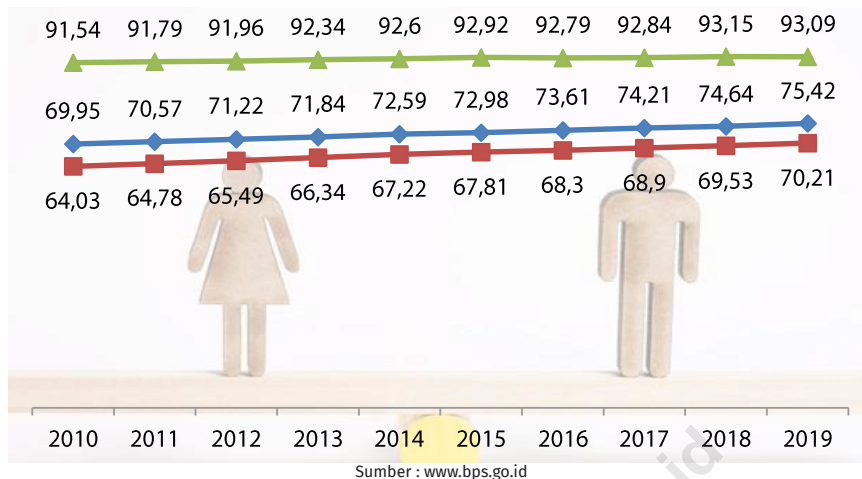
Istilah gender terkait dengan paradigma antara perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Di sebagian negara-negara yang di dominasi dengan budaya patriaki, perbedaan sering menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, serta kehidupan bermasyarakat. Untuk menghilangkan diskriminasi gender, diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai kebijakan diambil untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diantaranya ditetapkan melalui GBHN 1999, UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Diharapkan dengan upaya pemerintah yang didukung kesadaran dan partisipasi masyarakat, keadilan dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sulawesi Selatan tahun 2019 tercatat 93,09 sedikit menurun dibanding IPG Sulawesi Selatan tahun 2018 yang tercatat 93,15. Penjabarannya, IPM laki-laki di Sulawesi Selatan sebesar 75,42 dan perempuan sebesar 70,21. Sejak tahun 2010 IPM laki-laki di Sulawesi Selatan sudah berstatus 'tinggi' (nilainya diatas 70), dan sejak tahun 2019 IPM perempuan juga mencapai status 'tinggi'. Masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan IPG Sulawesi Selatan masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2010 hingga sekarang.

Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun secara trend, perkembangan pembangunan manusia perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2019, rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki sekitar 0,84 persen, sementara perempuan 1,03 persen. IPG Sulawesi Selatan sempat mengalami penurunan pada tahun 2016, penyebabnya adalah pertumbuhan IPM perempuan kalah cepat dibanding IPM laki-laki. Kemudian di tahun 2017, pembangunan gender di Sulawesi Selatan kembali mengalami peningkatan sekitar 0,05 persen, dan terus naik di tahun 2018. Peningkatan ini terjadi karena pertumbuhan IPM perempuan yang kembali lebih besar dibanding pertumbuhan IPM laki-laki pada periode tahun 2016-2017. IPM perempuan tumbuh 0,88 persen sementara IPM laki-laki tumbuh 0,82 persen.

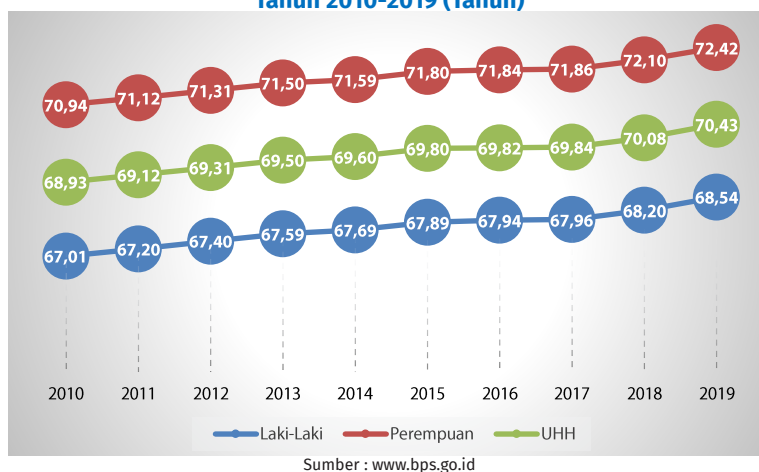
Gambar 3.1 Perkembangan IPG, IPM Laki-Laki, dan IPM Perempuan di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019



Fenomena penurunan IPG di tahun 2016, kembali terjadi di tahun 2019, dimana IPG Sulawesi Selatan turun sekitar 0,06 poin. Pada tahun 2019, pertumbuhan IPM laki-laki lebih cepat dibanding perempuan.

IPG merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Beberapa studi ilmiah telah membuktikannya, mulai dari segi kromosom, hormonal hingga gaya hidup, perempuan cenderung lebih unggul. Hal inilah yang menyebabkan secara umum umur harapan hidup perempuan lebih tinggi di banding laki-laki. Pada tahun 2019 UHH perempuan di Sulawesi Selatan telah mencapai 72,42 tahun, sementara laki-laki mencapai 68,54 tahun.

Gambar 3.2 Perkembangan UHH Laki-laki, UHH Perempuan dan Total UHH di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (Tahun)



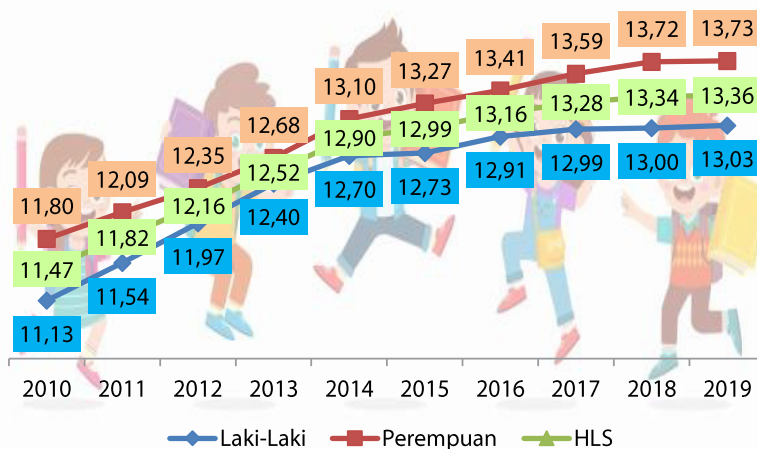
Meski UHH laki-laki lebih rendah dibanding perempuan, percepatan UHH laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dalam kurun waktu 2010-2019, rata-rata pertumbuhan UHH laki-laki pertahun sekitar 0,25 persen sementara perempuan sekitar 0,23 persen pertahun. Secara akumulasi UHH di Sulawesi Selatan tahun 2019 telah mencapai usia 70,43 tahun. Peningkatan UHH yang terjadi setiap tahunnya mengindikasikan kondisi kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan yang cenderung terus meningkat.

Berikutnya adalah dimensi pendidikan. Manusia membutuhkan asupan bagi akal pikirannya sebagai bekal kehidupannya. Pendidikan adalah senjata paling ampuh mengubah dunia (Nelson Mandela). Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai. Negara menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negaranya, yang termaktub dalam UUD 1945. Implementasinya tampak pada program nawacita serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Kualitas pembangunan manusia dalam dimensi pendidikan diwakili oleh harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

HLS mengukur peluang sekolah anak di masa mendatang, indikator ini diukur pada penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS juga merupakan pendorong (booster) untuk meningkatkan RLS. Secara agregat, HLS Sulawesi Selatan terus bertumbuh setiap tahunnya. Hingga tahun 2019, HLS Sulawesi Selatan telah mencapai 13,36 tahun, yang artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga ke jenjang Diploma.

Seperti usia harapan hidup, peluang bersekolah anak perempuan sedikit lebih baik dibanding laki-laki. Di tahun 2019, HLS perempuan tercatat 13,73 tahun, sementara laki-laki 13,03 tahun. Rendahnya peluang bersekolah laki-laki

Gambar 3.3 Perkembangan HLS Laki-laki, HLS Perempuan dan Total HLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (Tahun)

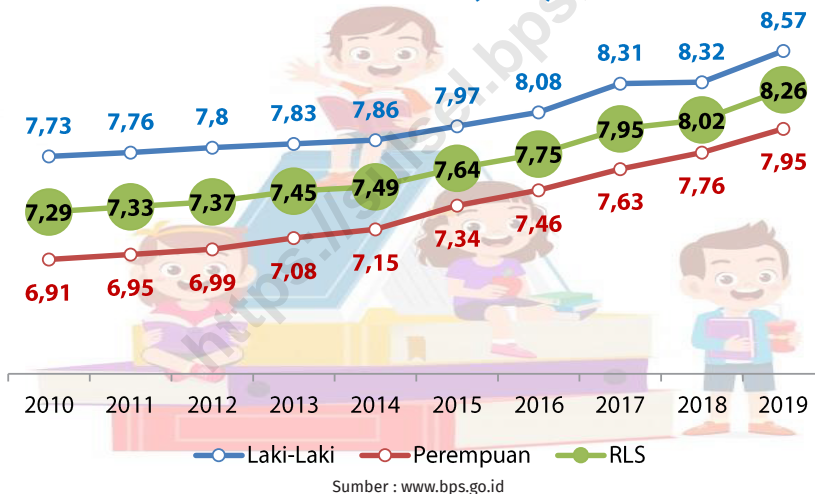


Sumber : www.bps.go.id

dibanding perempuan terkait fenomena diantaranya jumlah tenaga kerja anak laki-laki yang lebih tinggi dibanding perempuan. Kondisi ekonomi memaksa pekerja anak untuk bekerja, yang berimbas pada anak putus sekolah.

Realita ukuran keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah tercatat dalam angka RLS. Berbeda dengan HLS, di tahun 2019, secara rata-rata laki-laki di Sulawesi Selatan sudah mampu mengenyam pendidikan hingga 8,57 tahun atau sekitar kelas 2-3 SMP, sementara perempuan masih sekitar 7,95 tahun. Meski demikian, secara rata-rata, dalam kurun 2010 hingga 2019 trend pertumbuhan RLS perempuan ternyata lebih cepat dibanding laki-laki. Rata-rata pertumbuhan RLS perempuan sekitar 1,58 persen, sementara laki-laki tumbuh sekitar 1,16 persen. Fenomena ini terkait dengan fakta data partisipasi sekolah, di tahun 2018 dan 2019, angka partisipasi sekolah (APS) perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, baik jenjang SD, SMP ataupun SMA.

Gambar 3.4 Perkembangan RLS Laki-laki, RLS Perempuan dan Total RLS di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (Tahun)



Ukuran capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi dilihat dari dimensi standar hidup layak, yang menjadi dimensi berikutnya dalam konteks penghitungan indikator IPG. Standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita disesuaikan. Tren pengeluaran perkapita disesuaikan Sulawesi Selatan secara agregasi terus bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan di kisaran angka 1,97 persen. Tahun 2019, pengeluaran perkapita disesuaikan Sulawesi Selatan telah mencapai nilai 11,12 juta rupiah.

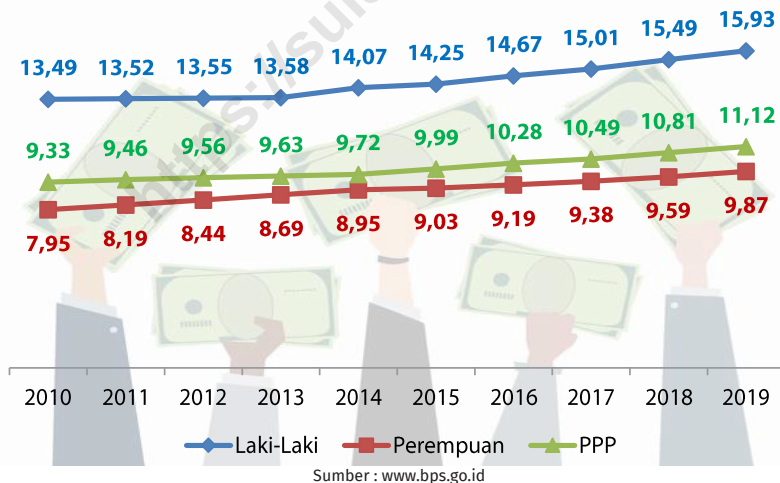
Secara gender, dari tahun 2010 hingga 2019, PPP laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Meski secara rata-rata pertumbuhan pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, namun senjang pengeluaran perkapita disesuaikan laki-laki dan perempuan di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi. Tercatat di tahun 2019 pengeluaran perkapita

disesuaikan laki-laki sebesar 15,93 juta rupiah, sementara perempuan sebesar 9,87 juta rupiah. Kondisi ini terkait fakta bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang memang lebih sedikit di banding laki-laki. Salah satu ukurannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.

Hingga tahun 2019 TPAK Sulawesi Selatan masih di dominasi oleh laki-laki dengan kisaran 70 hingga 80 persen, sementara perempuan masih dalam kisaran 40 persen. Pengeluaran terkait dengan pendapatan, dan pendapatan terkait usaha atau kerja. Dengan melihat kondisi ketenagakerjaan laki-laki dan perempuan, wajar apabila pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki.

Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan faktanya sudah berlangsung lama. Aspek kultural, terjadinya diskriminasi dalam lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan berperan dalam kesenjangan laki-laki dan perempuan. Usaha dan kebijakan seluruh pihak mutlak diperlukan untuk menggerus diskriminasi yang masih berlangsung secara masif.

Gambar 3.5 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Laki-laki, Perempuan dan Total Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019 (Juta Rupiah)



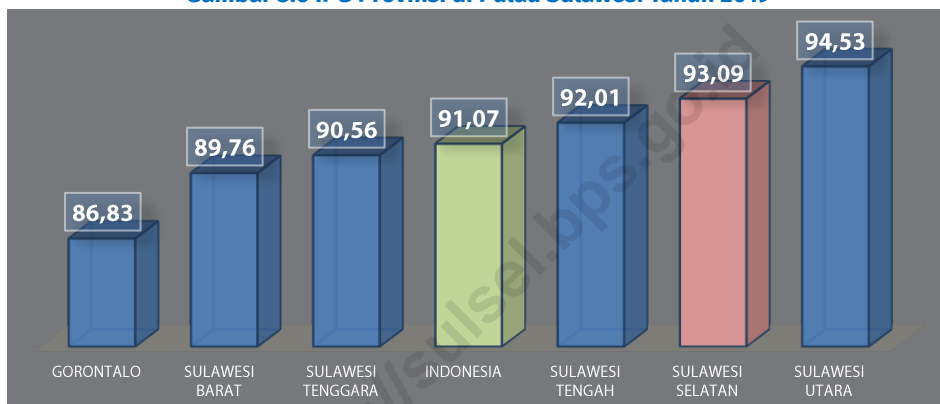
3.2. Posisi IPG Sulawesi Selatan di Indonesia

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda penting baik dalam program nawacita maupun tujuan pembangunan berkelanjutan. Melihat keterbandingan antar wilayah dapat menjadi evaluasi sejauh mana disparitas telah diminimalisir. Disamping itu, keterbandingan antar wilayah di Indonesia juga berperan penting dalam mengukur keberhasilan di wilayah masing-masing. Semakin rendah IPG suatu wilayah, semakin besar pula ketimpangan yang terjadi antara pembangunan manusia perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2019, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan IPG tertinggi di Indonesia dengan angka IPG sebesar 94,77, sementara IPG terendah diduduki oleh Papua dengan angka 80,05. Capaian IPG Sulawesi Selatan cukup baik dengan nilai 93,09 dan berada di posisi ke 7 secara nasional dibawah DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bali, dan Kep. Riau. Sejak tahun 2010 hingga 2018, angka IPG Sulawesi Selatan selalu berada di atas angka Nasional.

Dalam lingkup pulau Sulawesi, IPG provinsi Sulawesi Selatan berada pada urutan ke 2 setelah Sulawesi Utara. Posisi ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2010, saat dimulainya penghitungan IPG.

Gambar 3.6 IPG Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019



Sumber : www.bps.go.id

Tingginya usia penduduk perempuan terhadap laki-laki, merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam lingkup pulau Sulawesi, UHH perempuan Sulawesi Selatan ada di posisi ketiga setelah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Sementara pada dimensi pendidikan, HLS perempuan Sulawesi Selatan menempati posisi pertama di Sulawesi, sedangkan HLS laki-laki dan perempuan yang paling rendah ada di Sulawesi Barat.

Tidak adanya kesenjangan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Utara, menempatkan Sulawesi Utara berada pada posisi pertama indeks gendernya. Tahun yang dilalui RLS Sulawesi Utara pun paling tinggi dibanding 5 provinsi lain di pulau Sulawesi. Sementara Sulawesi Selatan sendiri menempati urutan ke 4 dalam konteks kesenjangan RLS.

Pendapatan, yang dianalogikan dengan kemampuan daya beli perempuan Sulawesi Selatan menempati urutan ke dua setelah Sulawesi Utara. Kesenjangan dalam pengeluaran perkapita disesuaikan ini masih tergolong tinggi untuk pulau Sulawesi, karena range indeksnya berkisar antara 37 hingga 66 persen. Pada kriteria kesenjangan, semakin mendekati angka 100, maka kesenjangan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya, semakin jauh dari angka 100, maka kesenjangan semakin tinggi.

Tabel 3.1 Tabel UHH, RLS, dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Provinsi-Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2019

Provinsi	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu rupiah/ tahun)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Sulawesi Utara	69,33	73,23	9,24	9,24	12,43	13,05	14.887	9.878
Sulawesi Tengah	65,86	69,75	8,76	8,27	12,83	13,49	13.300	7.873
Sulawesi Selatan	68,20	72,10	8,32	7,76	13,00	13,72	15.492	9.591
Sulawesi Tenggara	68,83	72,71	9,13	8,26	13,48	13,55	13.271	7.578
Gorontalo	65,51	69,53	7,14	7,76	12,77	13,51	13.860	5.126
Sulawesi Barat	62,76	66,47	7,66	7,28	12,28	12,97	13.157	6.805

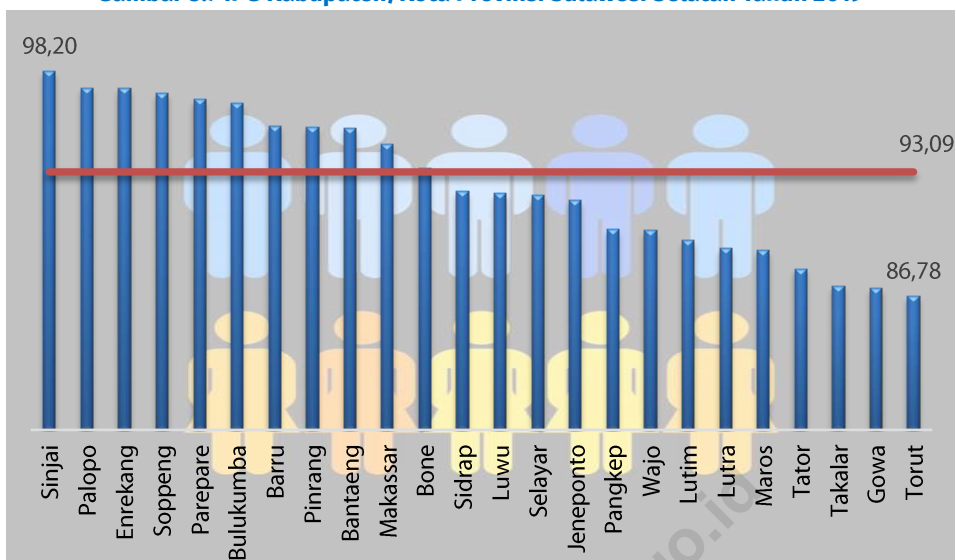
Sumber : www.bps.go.id

3.3. Pembangunan Gender di Kabupaten/Kota

Pembangunan manusia berbasis gender kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Semua kabupaten/kota pada dasarnya punya semangat yang sama dalam upaya meningkatkan pembangunan manusianya berikut kesetaraan. Meski demikian, capaian pembangunan gender masih belum merata di wilayah Sulawesi Selatan. Nilai IPG kabupaten/kota berada pada range 86,78 hingga 98,20. Selama dua tahun berturut-turut, Sinjai menjadi kabupaten dengan nilai IPG tertinggi di Sulawesi Selatan di tahun 2018-2019, sementara Toraja Utara merupakan kabupaten dengan nilai IPG terendah.

Dari elemen pembentuk IPG di kabupaten/kota, diketahui bahwa penduduk perempuan di Toraja Utara mempunyai umur harapan hidup yang paling panjang di Sulawesi Selatan, 75,18 tahun. Sementara laki-laki di Jeneponto menjadi penduduk dengan umur harapan hidup terendah di Sulawesi Selatan, 64,24 tahun. Meski demikian, kesenjangan ekonomi dalam kemampuan daya beli yang berasimilasi dengan pendapatan di Toraja Utara cukup tinggi. Tercatat pengeluaran perkapita disesuaikan perempuan di Toraja Utara hanya 5,20 juta rupiah (terendah di Sulawesi Selatan) sementara laki-laki mencapai 11,51 juta rupiah, menyebabkan indeks gender pengeluaran perkapita disesuaikan Toraja Utara menjadi rendah. Akumulasi dari kesenjangan-kesenjangan yang masih tinggi di beberapa indeks pembentuk IPG, menyebabkan Toraja Utara memiliki IPG terendah di Sulawesi Selatan. Lain halnya dengan Sinjai, sebagai kabupaten yang memiliki IPG tertinggi, dengan nilai IPG hampir mencapai 100, menunjukkan meratanya pembangunan gender di Sinjai.

Gambar 3.7 IPG Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber : www.bps.go.id

Secara umum, kabupaten/kota yang mempunyai IPM tinggi memiliki capaian IPG yang tinggi pula, dalam artian berada di atas rata-rata Sulawesi Selatan, terkecuali Sinjai, Soppeng, Bulukumba, dan Bantaeng, dimana nilai IPM-nya berada di peringkat 15 ke atas. Ada 11 kabupaten/kota mempunyai nilai IPG diatas rata-rata IPG Sulawesi Selatan. Sementara selebihnya masih di bawah rata-rata.



BAB IV

PEMBERDAYAAN GENDER SULAWESI SELATAN

<https://sps.go.id>

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB IV

PEMBERDAYAAN GENDER SULAWESI SELATAN

Pemberdayaan secara definisi merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Inti dari pemberdayaan ini adalah agar masyarakat memperoleh serta memaksimalkan daya, kekuatan, dan kemampuan. Beberapa indikator yang umumnya digunakan dalam mengukur pemberdayaan diantaranya: partisipasi dalam pendidikan, dalam dunia kerja, serta partisipasi dalam jabatan publik.

Sistem patriarki yang mendominasi sebagian besar masyarakat menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mencakup mulai dari ranah personal hingga lainnya. Secara historis, patriarki telah terwujud dalam sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi dalam berbagai budaya yang berbeda. Upaya pemberdayaan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang gender menjadi langkah penting proses modernisasi masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat.

4.1. Konsep Pemberdayaan Gender

Konsep pemberdayaan gender lebih mengacu pada proses terbukanya kesempatan yang setara ataupun sama. Sesuai dengan konsep UNDP (1995) yang memfokuskan makna pemberdayaan pada *opportunity*, bukan pada kapabilitas, yang menjadi ukuran *well-being*. Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender dalam konsep pemberdayaan adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perkembangan ketenagakerjaan yang semakin kondusif kontribusinya terhadap perempuan, menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki.

Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Titik beratnya adalah seberapa besar partisipasi perempuan, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Tabel 4.1 Dimensi dan Indikator Pembentuk IDG

Dimensi	Indikator
Keterwakilan di parlemen	Proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi; laki-laki dan perempuan
Distribusi pendapatan	Upah buruh non pertanian; laki-laki dan perempuan

Sumber : www.bps.go.id

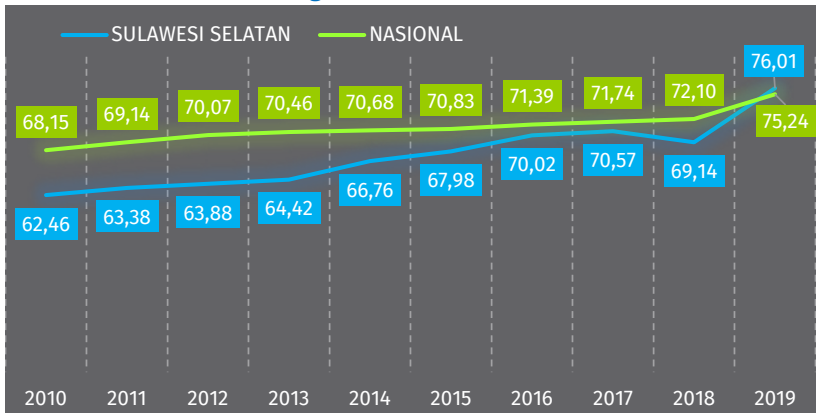
IDG diperoleh dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Jika IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi penduduk yang merata. Penghitungan sumbangan pendapatan untuk IDG sama dengan penghitungan untuk IPG. Selanjutnya masing-masing indeks komponen dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG.

Indikator dalam IDG sebenarnya masih belum mencakup semua ranah kehidupan secara keseluruhan, seperti pada indikator parlemen, dianggap hanya relevan bagi negara maju (Klasen, 2006). Kemudian pada indikator pengambilan keputusan hanya dilihat pada aspek ekonomi semata, padahal ketimpangan gender lebih banyak terjadi pada aspek non-ekonomi seperti pengambilan keputusan dalam rumah tangga (pemilihan menu makanan, pembelian alat-alat rumah tangga, pemeliharaan kesehatan anggota rumah tangga, dan pengaturan pembayaran sekolah). Metode penghitungan IDG memang masih mengacu pada metodologi lama sampai indeks ketidaksetaraan gender (IKG) bisa dihitung. Meski demikian, secara umum indeks pemberdayaan gender tetap dapat memperlihatkan capaian pemberdayaan secara gender yang ada di masyarakat.

4.2. IDG Sulawesi Selatan

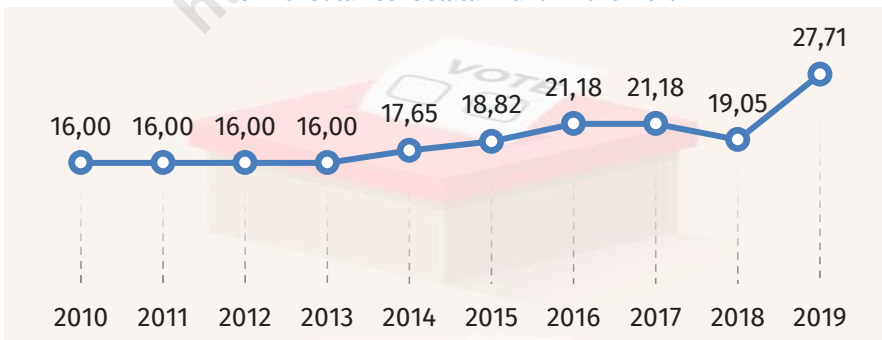
Perkembangan IDG Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dalam 7 tahun terakhir, dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 69,14. Namun di tahun 2019, angka IDG Sulawesi Selatan kembali mengalami peningkatan menjadi 76,01. Angka ini berada di atas angka IDG nasional (75,24). Kenaikan angka IDG Sulawesi Selatan secara umum disebabkan oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuk IDG di tahun 2019.

Gambar 4.1 Perkembangan IDG Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Sumber : www.bps.go.id

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

IDG dibangun oleh tiga dimensi, dimensi pertama yaitu indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen. Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik. Meskipun dunia politik di Indonesia masih di dominasi oleh kaum laki-laki, namun angka indeks keterwakilan perempuan di Sulawesi Selatan periode 2010 hingga 2017 terus mengalami kenaikan. Penurunan sempat terjadi di tahun 2018, dan naik kembali di tahun 2019 sebesar 8,66 poin persen, sehingga indeks keterlibatan perempuan di parlemen di tahun 2019 menjadi 27,71 persen.

Gambar 4.2 Perkembangan Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019

Sumber : www.bps.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR/DPRD, menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Pada periode sekarang yaitu periode 2019-2014, jumlah legislator yang telah terpilih sebanyak 85 orang, jumlah legislator perempuan mengalami peningkatan menjadi sebanyak 24 kursi anggota DPRD Sulawesi Selatan atau sekitar 28 persen kuota kursi perempuan, dimana periode sebelumnya (2014-2019) hanya diduduki 15

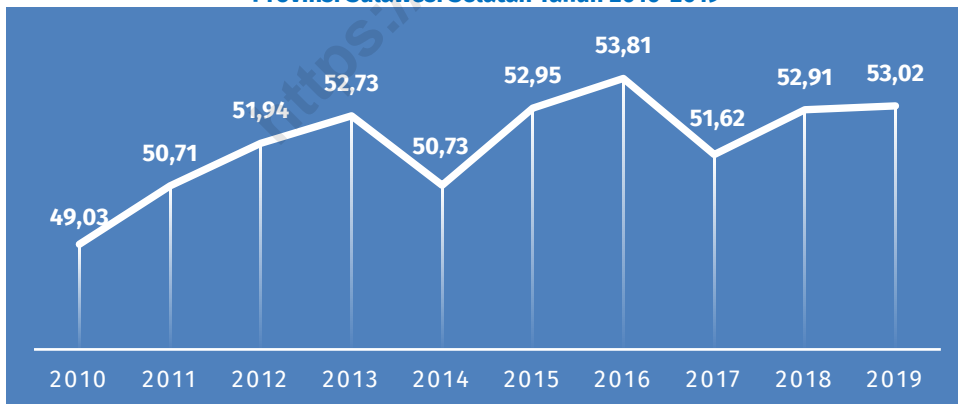
orang perempuan. Fakta ini memunculkan angka indeks keterwakilan perempuan di Sulawesi Selatan menjadi 27,71 persen, dan pada lima tahun kedepan angka IDG secara keseluruhan juga akan lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Peranan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Budaya yang masih berkembang di Indonesia adalah pemahaman bahwa tanggungjawab perempuan adalah pada sektor rumah tangga atau sektor internal, sementara laki-laki pada sektor publik. Partisipasi perempuan di sektor formal perlu terus ditingkatkan, agar pemberdayaan perempuan semakin bergerak positif yang akan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Perkembangan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Sulawesi Selatan memang berfluktuasi, namun secara umum memiliki gambaran yang positif. Sejak 2011 hingga 2019, angka keterlibatan perempuan Sulawesi Selatan sudah berada diatas 50 persen. Di tahun 2019, angka indeks telah mencapai 53,02 persen. yang artinya tenaga profesional di Sulawesi Selatan yang berperan pula sebagai pengambil keputusan telah mengalami kesetaraan gender. Perempuan Sulawesi Selatan mampu mengejar ketertinggalan dari laki-laki dalam sektor publik.

Gambar 4.3 Perkembangan Indeks Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019



Sumber : www.bps.go.id

Profesionalisme perempuan yang semakin diperhitungkan di Sulawesi Selatan tercermin salah satunya dalam komposisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sulawesi Selatan. Komposisi PNS perempuan telah melebihi jumlah PNS laki-laki. Di tahun 2018, proporsi PNS perempuan sekitar 52 persen, naik menjadi sekitar 53 persen di tahun 2019.

Dari 53 persen PNS perempuan tersebut, sekitar 58 persen pegawai golongan III berjenis kelamin perempuan. Golongan III merupakan komposisi PNS terbanyak di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (50 persen) dari seluruh

jenjang golongan. Golongan IV, yang merupakan kepangkatan tertinggi pada jenjang PNS, menunjukkan komposisi perempuan lebih unggul dibanding laki-laki, dengan persentase 51 persen.

Tabel 4.2 Jumlah PNS di Pemprov Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Kepangkatan Tahun 2019

Golongan Kepangkatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Golongan I	124	20	144
Golongan II	1.480	916	2.396
Golongan III	5.214	7.249	12.463
Golongan IV	4.829	5.006	9.835
Total	11.647	13.191	24.838

Sumber : www.bps.go.id

Dalam jenjang karir yang mengacu pada jabatan struktural, Badan Kepegawaian Daerah mencatat, komposisi struktural laki-laki memang masih lebih banyak dibanding perempuan (58 persen laki-laki dan 42 persen perempuan), namun perempuan cenderung dominan pada jabatan fungsional tertentu (selain staf), dengan dominasi sekitar 57 persen dibanding laki-laki.

Sementara dari segi pendidikan PNS, jenjang pendidikan tinggi di PNS tampak lebih didominasi oleh perempuan. Jenjang diploma (baik diploma I, II, dan III) hingga tingkat sarjana, lebih banyak perempuan. Sehingga secara umum, superioritas perempuan tampak pada ranah pemerintahan.

Tabel 4.3 Jumlah PNS di Pemprov Sulawesi Selatan Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2019

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
Sampai SD	122	20	142
SLTP/ sederajat	178	46	224
SLTA/ sederajat	1.695	1.101	2.796
Diploma I,II	65	115	180
Diploma III/ Sarjana Muda	468	925	1.393
Tingkat Sarjana/ Doktor/ Ph.d	9.119	10.984	20.103
Total	11.647	13.191	24.838

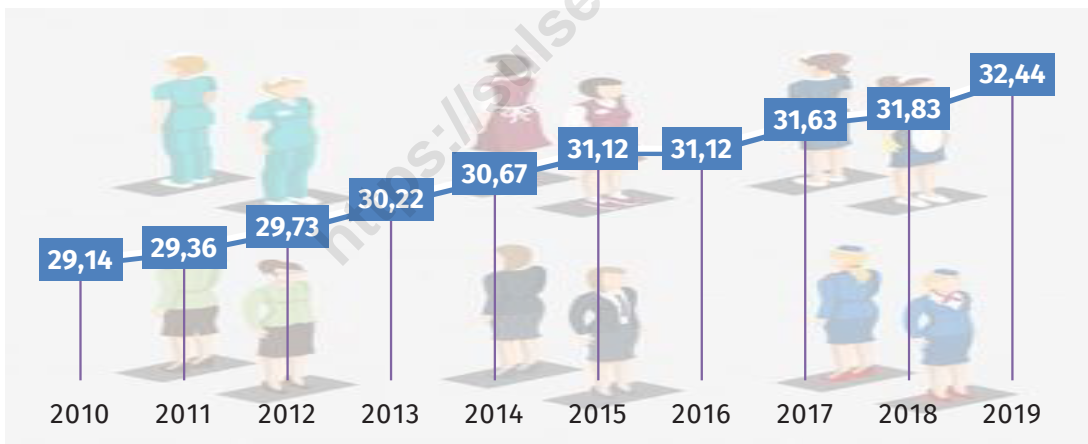
Sumber : www.bps.go.id

Posisi Perempuan dalam Distribusi Pendapatan

Kemampuan perempuan dalam penciptaan pendapatan di Sulawesi Selatan secara trend terus mengalami peningkatan. Meskipun capaiannya lebih rendah dalam berbagai indikator ekonomi dan tingkat partisipasi tenaga kerja, sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami peningkatan dalam periode 2010 hingga 2019. Di tahun 2019, sumbangan pendapatan perempuan mencapai angka 32,44 persen. Angka ini meningkat 0,61 poin persen dibanding tahun sebelumnya. Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi status pekerjaan penduduk perempuan yang bekerja lebih pada jenis pekerjaan yang tidak dibayar. Fenomena ini berhubungan dengan peran perempuan dalam distribusi pendapatan.

Meskipun mempunyai selisih yang cukup berjarak dengan kontribusi laki-laki, namun peningkatan yang kontinyu dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi positif terhadap perbaikan kondisi kesetaraan gender dalam hal ekonomi di Sulawesi Selatan.

Gambar 4.4 Perkembangan Indeks Perempuan dalam Distribusi Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2019



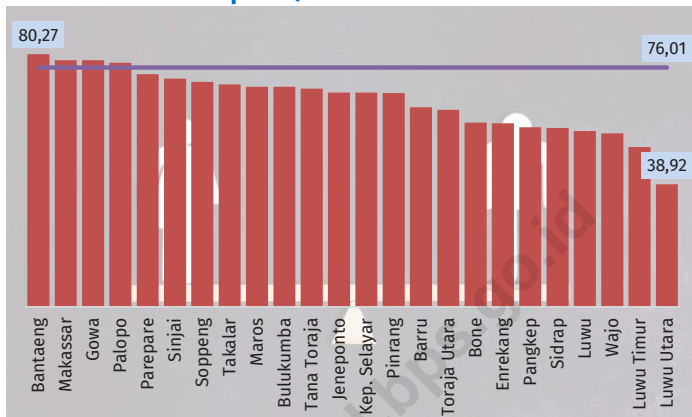
Sumber : www.bps.go.id

Sumbangan pendapatan perempuan yang terus meningkat dipengaruhi kualitas pendidikan perempuan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di tahun 2019, angka partisipasi sekolah penduduk perempuan usia 16-18 tahun (usia SMA) lebih tinggi dibanding laki-laki, dimana APS perempuan sekitar 73 persen, sementara laki-laki sekitar 68 persen. Penduduk perempuan yang berijazah perguruan tinggi juga mempunyai angka persentase yang lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 12,48 persen, sementara laki-laki 11,17 persen.

4.3. Capaian Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota

Pemberdayaan gender pada 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mempunyai angka yang bervariasi. Bantaeng merupakan kabupaten dengan IDG tertinggi sebesar 80,27, sementara itu Luwu Utara menjadi kabupaten dengan IDG terendah sebesar 38,92. Secara keseluruhan, hanya 4 kabupaten/kota yang berada di atas angka IDG Sulawesi Selatan.

Gambar 4.5 IDG Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019

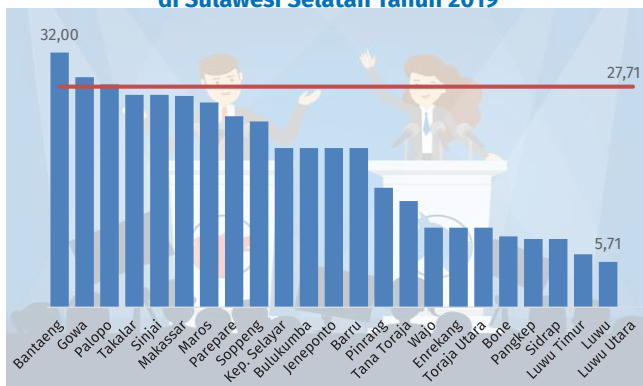


Sumber : www.bps.go.id

Capaian IDG kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tidak lepas dari capaian tiap komponen pembentuknya. Perubahan masing-masing komponen mempengaruhi pergerakan IDG secara keseluruhan.

Keterlibatan perempuan dalam parlemen cukup berpengaruh terhadap ketimpangan IDG. Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten dengan nilai IDG tertinggi, memiliki angka indeks keterlibatan perempuan dalam parlemen yang tertinggi pula, bahkan di atas 30 persen. Sedangkan Luwu Utara sebagai kabupaten dengan angka IDG terendah memiliki angka indeks keterlibatan perempuan dalam parlemen yang terendah di Sulawesi Selatan, tidak sampai 1 persen.

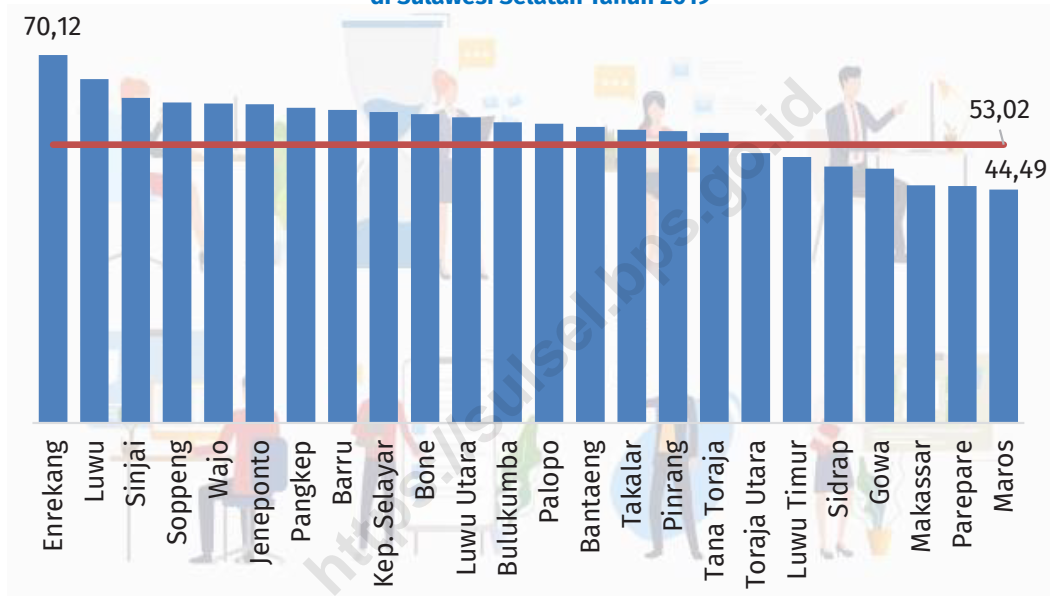
Gambar 4.6 Indeks Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber : www.bps.go.id

Keberdayaan perempuan sebagai tenaga profesional, tampaknya mulai merata di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki angka indeks perempuan sebagai pengambil keputusan atau tenaga profesional di atas rata-rata Sulawesi Selatan (sebanyak 17 kabupaten/kota). Enrekang menjadi kabupaten dengan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang tertinggi (angka indeks 70,12). Sementara Maros menjadi kabupaten di Sulawesi Selatan dengan angka indeks terendah (angka indeks 44,49).

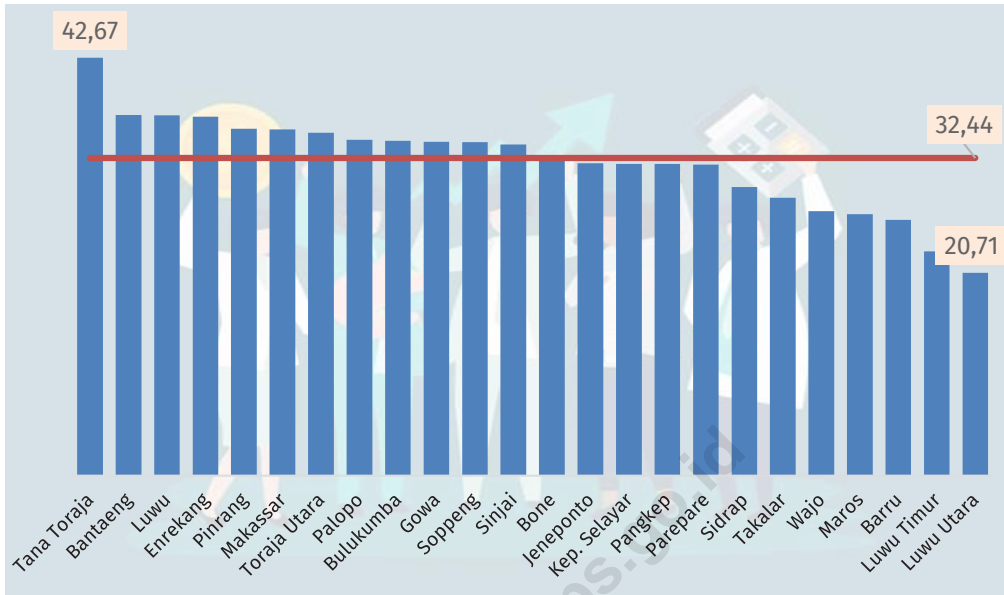
Gambar 4.7 Indeks Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber : www.bps.go.id

Peranan perempuan Sulawesi Selatan terhadap perekonomian, cukup merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan memiliki indeks distribusi pendapatan di atas rata-rata Sulawesi Selatan (angka indeks 32,44). Kabupaten Tana Toraja masih menjadi kabupaten dengan kemampuan indeks sumbangan pendapatan perempuan yang tertinggi dengan angka di atas 40 persen. Meski belum mencapai 50 persen, namun capaian indeks perempuan di Tana Toraja ini telah melampaui rata-rata nasional (angka indeks 37,10). Sementara Luwu Utara, menjadi kabupaten dengan kontribusi pendapatan perempuan yang terendah di Sulawesi Selatan (angka indeks 20,71).

Gambar 4.8 Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019





LAMPIRAN

<https://sulselbps.go.id>

<https://sulsel.bps.go.id>

LAMPIRAN 1

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019

Provinsi/Kab/Kota	IPM		IPG
	Laki-laki	Perempuan	
Kepulauan Selayar	71,92	66,11	91,92
Bulukumba	70,66	68,25	96,59
Bantaeng	69,48	66,22	95,31
Jeneponto	68,42	62,70	91,64
Takalar	71,42	62,34	87,29
Gowa	74,48	64,94	87,19
Sinjai	68,15	66,92	98,20
Maros	74,29	66,19	89,10
Pangkajene dan Kepulauan	73,09	65,90	90,16
Barru	73,44	70,08	95,42
Bone	69,21	64,54	93,25
Soppeng	69,86	67,82	97,08
Wajo	73,69	66,42	90,13
Sidenreng Rappang	75,04	69,10	92,08
Pinrang	73,49	70,07	95,35
Enrekang	73,57	71,59	97,31
Luwu	74,08	68,15	92,00
Tana Toraja	72,99	64,36	88,18
Luwu Utara	73,06	65,18	89,21
Luwu Timur	77,32	69,29	89,61
Toraja Utara	73,38	63,68	86,78
Kota Makasar	84,47	79,81	94,48
Kota Parepare	79,39	76,83	96,78
Kota Palopo	79,38	77,28	97,35
Sulawesi Selatan	75,42	70,21	93,09

LAMPIRAN 2

Komponen IPG Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2019

Provinsi/Kab/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu/Rupiah/Tahun)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kepulauan Selayar	66,30	70,27	12,41	13,57	7,94	7,43	14.420	7.905
Bulukumba	65,66	69,61	12,38	13,40	7,67	7,39	13.546	10.261
Bantaeng	68,40	72,33	11,81	12,37	7,17	6,41	11.937	9.315
Jeneponto	64,24	68,13	12,02	11,96	6,61	6,48	13.977	8.191
Takalar	64,99	68,91	12,23	12,56	7,37	7,02	16.353	6.772
Gowa	68,35	72,28	13,32	13,74	8,31	7,68	14.563	6.312
Sinjai	65,15	69,08	12,87	13,57	7,59	7,37	10.193	9.078
Maros	66,95	70,90	13,02	13,14	7,98	7,20	16.740	8.283
Pangkajene dan Kepulauan	64,48	68,38	12,39	12,89	8,08	7,15	17.985	9.318
Barru	66,87	70,83	13,48	13,81	8,16	7,79	14.109	10.612
Bone	64,87	68,79	12,42	13,47	7,20	6,86	12.827	7.816
Soppeng	67,40	71,35	12,73	13,05	7,80	7,69	10.764	9.043
Wajo	65,15	69,08	12,85	13,64	7,14	6,40	20.277	9.647
Sidenreng Rappang	67,56	71,50	12,53	13,27	8,13	7,60	18.310	10.077
Pinrang	67,36	71,31	12,34	13,99	8,34	7,52	15.404	10.512
Enrekang	68,82	72,74	13,64	14,17	9,25	8,31	11.128	10.215
Luwu	68,17	72,10	12,83	13,71	8,56	7,91	14.397	8.279
Tana Toraja	71,20	75,00	13,24	14,09	8,51	7,94	10.714	5.227
Luwu Utara	66,27	70,23	12,53	12,36	7,92	7,34	16.230	8.214
Luwu Timur	68,36	72,29	12,75	13,21	8,88	8,20	19.710	9.272
Toraja Utara	71,40	75,18	12,94	13,67	8,42	7,69	11.512	5.188
Kota Makassar	70,01	73,87	15,38	16,06	11,52	10,89	20.432	13.591
Kota Parepare	69,17	73,07	14,11	14,65	10,66	9,92	15.856	13.379
Kota Palopo	68,77	72,69	14,10	15,77	10,90	10,49	15.740	12.069
Sulawesi Selatan	68,54	72,42	13,03	13,73	8,57	7,95	15.928	9.868

LAMPIRAN 3

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan Komponennya, 2019

Provinsi/Kab/Kota	Keterlibatan perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
Kepulauan Selayar	20,00	59,26	31,85	68,03
Bulukumba	20,00	57,26	34,19	69,89
Bantaeng	32,00	56,43	36,84	80,27
Jeneponto	20,00	60,70	31,89	68,04
Takalar	26,67	55,88	28,38	70,66
Gowa	28,89	48,45	34,09	78,31
Sinjai	26,67	61,92	33,83	72,48
Maros	25,71	44,49	26,70	69,93
Pangkajene dan Kepulauan	8,57	60,08	31,82	57,03
Barru	20,00	59,63	26,12	63,41
Bone	8,89	58,84	32,13	58,55
Soppeng	23,33	61,03	34,05	71,45
Wajo	10,00	60,87	27,01	55,09
Sidenreng Rappang	8,57	48,87	29,47	56,80
Pinrang	15,00	55,60	35,41	67,92
Enrekang	10,00	70,12	36,65	58,28
Luwu	5,71	65,50	36,80	55,89
Tana Toraja	13,33	55,23	42,67	69,32
Luwu Utara	0,01	58,20	20,71	38,92
Luwu Timur	6,67	50,68	22,89	50,76
Toraja Utara	10,00	51,39	35,01	62,58
Kota Makasar	26,53	45,26	35,36	78,32
Kota Parepare	24,00	45,11	31,78	73,86
Kota Palopo	28,00	56,99	34,30	77,53
Sulawesi Selatan	27,71	53,02	32,44	76,01

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125

Telp: (0411) 854838, Fax: (0411) 851225

Homepage: <https://sulsel.bps.go.id> Email: bps7300@bps.go.id

ISBN 978-623-7581-67-3



9 786237 581673